



**PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

AREA 1

MANAJEMEN PERUBAHAN

- iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM**
 - a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana

MANAJEMEN PERUBAHAN

ANGGOTA TIM KERJA AREA 1



Sigit Purnomo
Penanggung Jawab



Nor Rosyid Ardani
Ketua



Mundiri
Ketua



Maria Ulfah Kusumaastuti
Sekretaris



Yogi Djatnika
Sekretaris



Tarnoto
Anggota



Debby
Anggota




Agung Wisnu Laksono
Anggota



Aria Yudha
Anggota

DAFTAR ISI

1. Monitoring dan Evaluasi ZI Januari-Juni 2024
 2. Rencana Kerja PUSTIK WBBM 2024
 3. Laporan pengembangan Website
 4. Laporan Pengembangan SIMPP (jadwal-layout bangku sidang, konfirmasi kehadiran para pihak dll)
- 



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE BULAN JANUARI 2024

I. LATAR BELAKANG

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang telah diusulkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2024 sudah mulai dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara bertahap berdasarkan masing-masing komponen pengungkit sesuai dengan tim yang telah dibentuk. Monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas periode bulan Januari merupakan langkah awal sebagai persiapan untuk diajukan kepada Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penginputan penilaian mandiri pada aplikasi Microsite Pustik (<https://pustik.mkri.id>), Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menyiapkan beberapa hal dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung untuk meningkatkan nilai dari hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas.



II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 90.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 68.1 Tahun 2024 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2024.

III. TUJUAN

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan;
2. Mengkoordinir percepatan implementasi progress pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sesuai target dalam rencana kerja;
3. Memastikan hambatan atau kendala atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah diselesaikan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;



IV. RUANG LINGKUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

A. Monitoring

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah rencana aksi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;

B. Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 6 Komponen Pengungkit:

1. Area Manajemen Perubahan;
2. Area Penataan Tata Laksana;
3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Area Penguatan Akuntabilitas;
5. Area Penguatan Pengawasan;
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



V. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE JANUARI 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR		PROSES		CATATAN
				SUDAH SELESAI	BELUM SELESAI	
1	Manajemen Perubahan	a	Penyusunan Tim Kerja			<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan ZI Pustik Tahun 2024 telah disusun dan diajukan kepada Sekjen melalui Nota Dinas SK Tim telah ditandatangani Sekjen
		b	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas			<ul style="list-style-type: none"> Dalam bentuk draft, menunggu kompilasi dari semua area perubahan
		c	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM			<ul style="list-style-type: none"> Laporan monitoring dan evaluasi sedang disusun
		d	Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja			<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan pegawai untuk menentukan agent of change telah dilakukan Agent of Change akan diusulkan ke Sekjen untuk mendapat persetujuan dan penetapannya.
2	Penataan Tata Laksana	a	Standar Operasional Prosedur (SOP)			<ul style="list-style-type: none"> SOP Pusat TIK telah diinventarisasi, disusun, dan direview. Pengumpulan dokumen dan bukti dukung yang menunjukkan bahwa pustik telah



					melakukan inovasi selaras dengan SOP dan peta proses bisnis mulai dikumpulkan.
		b	konfirmasi kehadiran sidang para pihak secara <i>online</i> pada SIMPP baru		<ul style="list-style-type: none"> • SIMPP baru akan ditambahkan : <ul style="list-style-type: none"> - pembuatan layout bangku konfirmasi kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> - pembuatan input data para pemohon secara <i>online</i> - pembuatan kartu kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> - pembuatan link untuk pengiriman kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> melalui WA
		c	Layout sidang otomatis generate berdasarkan plotting bangku ruang sidang pada SIMPP baru		<ul style="list-style-type: none"> • SIMPP baru akan ditambahkan : <ul style="list-style-type: none"> - pembuatan layout bangku sidang para pemohon baik secara <i>offline/online</i> - pembuatan nomor bangku sidang para pemohon baik secara <i>offline/online</i>
		d	Website mkri.id		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan website mkri.id: <ul style="list-style-type: none"> - inventarisir kebutuhan tampilan laman baru mkri - pembuatan <i>mock up</i> tampilan laman mkri



3	Penataan Sistem Manajemen SDM	a	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi		<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan koordinasi dengan biro SDMO terkait analisis beban kerja dan peta jabatan untuk penugasan pegawai • Akan dilengkapi dengan dokumen sosialisasi perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.
		b	Pola Mutasi Internal		<ul style="list-style-type: none"> • Data mutasi pegawai sedang dikumpulkan dan dipersiapkan • Dokumen yang akan dilengkapi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Perubahan Jabatan Pegawai di PUSTIK 2. Usulan Penataan Pegawai di PUSTIK 3. Persandingan Uraian Jabatan Pemangku Jabatan dengan pelaksanaan tupoksi pegawai di PUSTIK 4. Analisis Gap Kompetensi pegawai di PUSTIK
		c	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi		<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen presentase kesenjangan kompetensi pegawai telah dikumpulkan • Akan dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Penilaian Mandiri Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai 2. Dokumen hasil Penilaian Mandiri 3. Dokumen analisis hasil Penilaian Mandiri



		d	Penetapan Kinerja Individu			<ul style="list-style-type: none"> • Cascading kinerja pegawai Pusat TIK telah disusun
		e	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai			<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil penegakkan disiplin pegawai Pusat TIK telah disusun oleh Biro SDMO./ • Akan dilengkapi dokumen terkait inovasi yang telah dilakukan terkait aturan disiplin pegawai.
		f	Sistem Informasi Kepegawaian			<ul style="list-style-type: none"> • Update data informasi kepegawaian Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait kehadiran dan cuti telah dilakukan
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a	Keterlibatan Pimpinan			<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan unit kerja lain telah dilaksanakan dipimpin oleh Kepala Pusat TIK • Akan ditambahkan: <ul style="list-style-type: none"> - Contoh SKP Bulanan, misalnya SKP Pak Sigit, Pak Mandiri, Pak Rosyid dan Bu Ulfa. - Dokumentasi rapat-rapat pimpinan
		b	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja			<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi terkait perencanaan telah dilaksanakan dipimpin oleh Kepala Pusat TIK • Akan dikumpulkan: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan tindak lanjut kinerja bisa dimasukkan bila ada. - Laporan kinerja anggaran bisa dimasukkan juga.



5	Penguatan Pengawasan	a	Pengendalian Gratifikasi			<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan bekerjasama dengan Inspektorat • Akan dikumpulkan: <ul style="list-style-type: none"> - Bukti Public Campaign inspektorat melalui signage sebagai evidence. - Sosialisasi gratifikasi yang dilakukan KPK. - Laporan inspektorat terkait pengendalian gratifikasi.
		b	Penerapan SPIP			<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan bekerjasama dengan Inspektorat • Akan dikumpulkan: <ul style="list-style-type: none"> - Melampirkan SOP, Soft Control, Kode Etik, Pakta Integritas, - Pembuatan manajemen risiko PUSTIK dan rencana tindak pengendalian
		c	Pengaduan Masyarakat			<ul style="list-style-type: none"> - SK PIC Lapor per unit kerja, jalur pengaduan, SP4N Lapor, SOP Penanganan Pengadaan, SK Tim penanganan pengadaan - Laporan setiap kegiatan Foto yang sudah ditindaklanjuti, contoh Survei Eksternal →



						Hubungi MK di web, Survei Internal → Troubleshoot
		d	Whistle-Blowing System			<ul style="list-style-type: none"> Evidence terkait WBS Tahun 2024 dalam proses permintaan ke inspektorat
		e	Penanganan Benturan Kepentingan			<ul style="list-style-type: none"> Evidence terkait benturan kepentingan Tahun 2024 dalam proses permintaan ke inspektorat
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	a	Standar Pelayanan			<ul style="list-style-type: none"> Standar Pelayanan telah disusun
		b	Budaya Pelayanan Prima			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan bimbingan teknis penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
		c	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan survey dan e-Voting untuk penilaian kepuasan terhadap pelayanan Pusat TIK tahun sebelumnya



VI. PENUTUP

Hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Januari ini, masih perlu dilengkapi dengan dokumen bukti dan data-data pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan Zona Integritas.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk bulan Januari 2024, semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Jakarta, 31 Januari 2024

Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,

Sigit Purnomo



Digital Signature
[mk995553633240709033119](#)



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE BULAN FEBRUARI 2024

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun yang merupakan unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara bertahap berdasarkan masing-masing komponen pengungkit sesuai dengan tim yang telah dibentuk. Laporan monitoring dan evaluasi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi periode bulan Februari merupakan langkah awal sebagai persiapan untuk diajukan kepada Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penginputan penilaian mandiri pada aplikasi Microsite Pustik (<https://pustik.mkri.id>), Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menyiapkan beberapa hal dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung untuk meningkatkan nilai dari hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas.



II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 90.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 68.1 Tahun 2024 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2024.

III. TUJUAN

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan;
2. Mengkoordinir percepatan implementasi progress pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sesuai target dalam rencana kerja;
3. Memastikan hambatan atau kendala atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah diselesaikan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;



IV. RUANG LINGKUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

A. Monitoring

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah rencana aksi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;

B. Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 6 Komponen Pengungkit:

1. Area Manajemen Perubahan;
2. Area Penataan Tata Laksana;
3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Area Penguatan Akuntabilitas;
5. Area Penguatan Pengawasan;
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



V. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE FEBRUARI 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR		PROSES		CATATAN
				SUDAH SELESAI	BELUM SELESAI	
1	Manajemen Perubahan	a	Penyusunan Tim Kerja			<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan ZI Pustik Tahun 2024 telah mendapat persetujuan dari Sekjen SK Tim telah ditandatangani Sekjen
		b	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas			<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana kerja Tim Pembangunan ZI telah disusun Target Prioritas, Rencana kerja dan target capaian kinerja masing-masing area telah dibahas dan disetujui
		c	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM			<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan Laporan monitoring dan evaluasi sedang dalam tahap pembuatan
		d	Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja			<ul style="list-style-type: none"> Mendokumentasikan kegiatan agent of change telah dilakukan sebagai bukti hasil kinerja dan manajemen talenta



2	Penataan Tata Laksana	a	Standar Operasional Prosedur (SOP)		<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pusat TIK telah diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari. • Pengumpulan dokumen dan bukti dukung yang menunjukkan bahwa pustik telah melakukan inovasi selaras dengan SOP dan peta proses bisnis mulai dikumpulkan.
		b	konfirmasi kehadiran sidang para pihak secara <i>online</i> pada SIMPP baru		<ul style="list-style-type: none"> • SIMPP baru akan ditambahkan : <ul style="list-style-type: none"> - pembuatan layout bangku konfirmasi kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> - pembuatan input data para pemohon secara <i>online</i> - pembuatan kartu kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> - pembuatan link untuk pengiriman kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> melalui WA
		c	Layout sidang otomatis generate berdasarkan plotting bangku ruang sidang pada SIMPP baru		<ul style="list-style-type: none"> • SIMPP baru akan ditambahkan : <ul style="list-style-type: none"> - pembuatan layout bangku sidang para pemohon baik secara <i>offline/online</i> - pembuatan nomor bangku sidang para pemohon baik secara <i>offline/online</i>
		d	Website mkri.id		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan website mkri.id:



					<ul style="list-style-type: none"> - inventalisir kebutuhan tampilan laman baru mkri - pembuatan <i>mock up</i> tampilan laman mkri - pembuatan <i>coding mock up</i> tampilan laman mkri (sedang proses)
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	a	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi		<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan koordinasi dengan biro SDMO terkait analisis beban kerja dan peta jabatan untuk penugasan pegawai • Akan dilengkapi dengan dokumen sosialisasi perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.
		b	Pola Mutasi Internal		<ul style="list-style-type: none"> • Data mutasi pegawai sedang dikumpulkan dan dipersiapkan • Dokumen yang akan dilengkapi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Perubahan Jabatan Pegawai di PUSTIK 2. Usulan Penataan Pegawai di PUSTIK 3. Persandingan Uraian Jabatan Pemangku Jabatan dengan pelaksanaan tupoksi pegawai di PUSTIK 4. Analisis Gap Kompetensi pegawai di PUSTIK
		c	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi		<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen presentase kesenjangan kompetensi pegawai telah dikumpulkan



					<ul style="list-style-type: none"> Akan dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Penilaian Mandiri Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Dokumen hasil Penilaian Mandiri 3. Dokumen analisis hasil Penilaian Mandiri
		d	Penetapan Kinerja Individu		<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan penilaian kinerja individu secara rutin
		e	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai		<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil penegakkan disiplin pegawai Pusat TIK telah disusun oleh Biro SDMO./ Akan dilengkapi dokumen terkait inovasi yang telah dilakukan terkait aturan disiplin pegawai.
		f	Sistem Informasi Kepegawaian		<ul style="list-style-type: none"> Update data informasi kepegawaian Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait kehadiran dan cuti telah dilakukan
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a	Keterlibatan Pimpinan		<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan unit kerja lain telah dilaksanakan dipimpin oleh Kepala Pusat TIK Kepala Pusat TIK telah melakukan pemantauan/monitoring terhadap SKP Bulanan dan kinerja pegawai Pusat TIK Dokumentasi rapat-rapat pimpinan
		b	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring terhadap akuntabilitas kinerja telah dilakukan oleh Kepala Pusat TIK dan telah



					<p>dilakukan koordinasi dengan Bagian Perencanaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akan dikumpulkan: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan tindak lanjut kinerja bisa dimasukkan bila ada. - Laporan kinerja anggaran bisa dimasukkan juga. - Capture serapan anggaran yang ada di website utama MK (MKRI.ID)
5	Penguatan Pengawasan	a	Pengendalian Gratifikasi		<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan bekerjasama dengan Inspektorat • Akan dikumpulkan: <ul style="list-style-type: none"> - Bukti Public Campaign inspektorat melalui signage sebagai evidence. - Sosialisasi gratifikasi yang dilakukan KPK. - Laporan inspektorat terkait pengendalian gratifikasi.
		b	Penerapan SPIP		<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme pengendalian resiko Pusat TIK telah dilaksanakan • Akan dikumpulkan: <ul style="list-style-type: none"> - Melampirkan SOP, Soft Control & Hard Control, Kode Etik, Pakta Integritas, SK Tim SPIP per unit kerja (SPIP terintegrasi ke depannya)



					<ul style="list-style-type: none"> - Review kembali manajemen resiko yang sudah ada dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.
		c	Pengaduan Masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan pemantauan terkait pengaduan Masyarakat dan telah dilakukan koordinasi dengan inspektorat terkait pengelolaan tindak lanjut laporan yang masuk. • Akan dikumpulkan: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan setiap kegiatan Foto yang sudah ditindaklanjuti
		d	Whistle-Blowing System		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi WBS telah dilaksanakan • Evidence terkait WBS Tahun 2024 dalam proses permintaan ke inspektorat
		e	Penanganan Benturan Kepentingan		<ul style="list-style-type: none"> • Evidence terkait benturan kepentingan Tahun 2024 dalam proses permintaan ke inspektorat
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	a	Standar Pelayanan		<ul style="list-style-type: none"> • Standar Pelayanan telah disusun
		b	Budaya Pelayanan Prima		<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan bimbingan teknis penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
		c	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan		<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan survey dan e-Voting untuk penilaian kepuasan terhadap pelayanan Pusat TIK tahun sebelumnya



VI. PENUTUP

Hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Februari ini, masih perlu dilengkapi dengan dokumen bukti dan data-data pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan Zona Integritas.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk bulan Februari 2024, semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Jakarta, 29 Februari 2024

Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,

Sigit Purnomo



Digital Signature
[mk995553633240709033443](#)



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE BULAN MARET 2024

I. LATAR BELAKANG

Pada bulan Maret 2024, Mahkamah Konstitusi mengalihkan fokusnya sementara pada penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden. Namun demikian, proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah dicanangkan sebelumnya tetap dilanjutkan. Proses Pembangunan yang berlangsung di unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Seperti bulan sebelumnya, Pusat TIK juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas tersebut yang dilakukan secara bertahap berdasarkan masing-masing komponen pengungkit sesuai dengan tim yang telah dibentuk. Kegiatan merupakan bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas. Laporan monitoring dan evaluasi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi periode bulan Maret disiapkan untuk diunggah pada Microsite Pustik (<https://pustik.mkri.id>) sebelum diajukan kepada Tim Penilai Internal (TPI), Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menyiapkan beberapa hal dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung untuk meningkatkan nilai dari hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas.



II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 90.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 68.1 Tahun 2024 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2024.

III. TUJUAN

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan;
2. Mengkoordinir percepatan implementasi progress pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sesuai target dalam rencana kerja;
3. Memastikan hambatan atau kendala atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah diselesaikan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;



IV. RUANG LINGKUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

A. Monitoring

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah rencana aksi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;

B. Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 6 Komponen Pengungkit:

1. Area Manajemen Perubahan;
2. Area Penataan Tata Laksana;
3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Area Penguatan Akuntabilitas;
5. Area Penguatan Pengawasan;
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



V. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE MARET 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR		PROSES		CATATAN
				SUDAH SELESAI	BELUM SELESAI	
1	Manajemen Perubahan	a	Penyusunan Tim Kerja			<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan ZI Pustik Tahun 2024 telah mendapat persetujuan dari Sekjen SK Tim telah ditandatangani Sekjen
		b	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas			<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana kerja Tim Pembangunan ZI telah disusun Target Prioritas, Rencana kerja dan target capaian kinerja masing-masing area telah dibahas dan disetujui
		c	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM			<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan Laporan monitoring dan evaluasi sedang dalam tahap pembuatan
		d	Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja			<ul style="list-style-type: none"> Mendokumentasikan kegiatan <i>agent of change</i> telah dilakukan sebagai bukti hasil kinerja dan manajemen talenta



2	Penataan Tata Laksana	a	Standar Operasional Prosedur (SOP)			<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pusat TIK telah diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari
		b	konfirmasi kehadiran sidang para pihak secara <i>online</i> pada SIMPP baru			<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring penggunaan : <ul style="list-style-type: none"> - pengisian layout bangku konfirmasi kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> - input data para pemohon secara <i>online</i> - kartu kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> - link untuk pengiriman kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> melalui WA
		c	Layout sidang otomatis generate berdasarkan plotting bangku ruang sidang pada SIMPP baru			<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring penggunaan : <ul style="list-style-type: none"> - layout bangku sidang para pemohon baik secara <i>offline/online</i> - nomor bangku sidang para pemohon baik secara <i>offline/online</i>
		d	Website mkri.id			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan website mkri.id: <ul style="list-style-type: none"> - pembuatan <i>coding mock up</i> tampilan laman mkri (sedang proses)
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	a	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi			<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan koordinasi dengan biro SDMO terkait analisis beban kerja dan peta jabatan untuk penugasan pegawai



		b	Pola Mutasi Internal		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi pegawai yang di mutasi ke Pusat TIK
		c	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi hasil Penilaian pegawai
		d	Penetapan Kinerja Individu		<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan penilaian kinerja individu secara rutin
		e	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi hasil penegakkan disiplin pegawai Pusat TIK telah disusun oleh Biro SDMO
		f	Sistem Informasi Kepegawaian		<ul style="list-style-type: none"> • Update data informasi kepegawaian Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait kehadiran dan cuti telah dilakukan
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a	Keterlibatan Pimpinan		<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan unit kerja lain telah dilaksanakan dipimpin oleh Kepala Pusat TIK • Kepala Pusat TIK telah melakukan pemantauan/monitoring terhadap SKP Bulanan dan kinerja pegawai Pusat TIK • Dokumentasi rapat-rapat pimpinan
		b	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja telah dilakukan oleh Kepala Pusat TIK dan telah dilakukan koordinasi dengan Bagian Perencanaan



5	Penguatan Pengawasan	a	Pengendalian Gratifikasi			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi Mekanisme pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan bekerjasama dengan Inspektorat
		b	Penerapan SPIP			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi Mekanisme pengendalian resiko Pusat TIK telah dilaksanakan
		c	Pengaduan Masyarakat			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan pemantauan terkait pengaduan Masyarakat dan telah dilakukan koordinasi dengan inspektorat terkait pengelolaan tindak lanjut laporan yang masuk.
		d	Whistle-Blowing System			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi WBS telah dilaksanakan Evidence terkait WBS Tahun 2024 dalam proses permintaan ke inspektorat
		e	Penanganan Benturan Kepentingan			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi proses penanganan benturan kepentingan juga telah dilaksanakan bekerja sama dengan Inspektorat
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	a	Standar Pelayanan			<ul style="list-style-type: none"> Standar Pelayanan telah disusun
		b	Budaya Pelayanan Prima			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan bimbingan teknis penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
		c	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan survey dan e-Voting untuk penilaian kepuasan terhadap pelayanan Pusat TIK tahun sebelumnya



VI. PENUTUP

Hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Maret ini, masih perlu dilengkapi dengan dokumen bukti dan data-data pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan Zona Integritas.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk bulan Maret 2024, semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Jakarta, 29 Maret 2024

Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,

Sigit Purnomo



Digital Signature
mk-507717779240709035616



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE BULAN APRIL 2024

I. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi masih tetap mengerahkan seluruh perhatian dan tenaga pada penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif. Di sisi lain, proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah dicanangkan sebelumnya tidak berhenti berlangsung. Proses Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Seperti bulan sebelumnya, Pusat TIK juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas tersebut yang dilakukan secara bertahap berdasarkan masing-masing komponen pengungkit sesuai dengan tim yang telah dibentuk. Kegiatan merupakan bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas. Laporan monitoring dan evaluasi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi periode bulan April disiapkan untuk diunggah pada Microsite Pustik (<https://pustik.mkri.id>) sebelum diajukan kepada Tim Penilai Internal (TPI), Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menyiapkan beberapa hal dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung untuk meningkatkan nilai dari hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas.



II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 90.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 68.1 Tahun 2024 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2024.

III. TUJUAN

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan;
2. Mengkoordinir percepatan implementasi progress pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sesuai target dalam rencana kerja;
3. Memastikan hambatan atau kendala atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah diselesaikan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;



IV. RUANG LINGKUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

A. Monitoring

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah rencana aksi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;

B. Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 6 Komponen Pengungkit:

1. Area Manajemen Perubahan;
2. Area Penataan Tata Laksana;
3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Area Penguatan Akuntabilitas;
5. Area Penguatan Pengawasan;
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



V. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE APRIL 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR		PROSES		CATATAN
				SUDAH SELESAI	BELUM SELESAI	
1	Manajemen Perubahan	a	Penyusunan Tim Kerja			<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan ZI Pustik Tahun 2024 telah mendapat persetujuan dari Sekjen SK Tim telah ditandatangani Sekjen
		b	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas			<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana kerja Tim Pembangunan ZI telah disusun Target Prioritas, Rencana kerja dan target capaian kinerja masing-masing area telah dibahas dan disetujui
		c	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM			<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan Laporan monitoring dan evaluasi sedang dalam tahap pembuatan
		d	Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja			<ul style="list-style-type: none"> Mendokumentasikan kegiatan <i>agent of change</i> telah dilakukan sebagai bukti hasil kinerja dan manajemen talenta



2	Penataan Tata Laksana	a	Standar Operasional Prosedur (SOP)		<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pusat TIK telah diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari
		b	konfirmasi kehadiran sidang para pihak secara <i>online</i> pada SIMPP baru		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring penggunaan : <ul style="list-style-type: none"> - pengisian layout bangku konfirmasi kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> - input data para pemohon secara <i>online</i> - kartu kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> - link untuk pengiriman kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> melalui WA
		c	Layout sidang otomatis generate berdasarkan plotting bangku ruang sidang pada SIMPP baru		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring penggunaan : <ul style="list-style-type: none"> - layout bangku sidang para pemohon baik secara <i>offline/online</i> - nomor bangku sidang para pemohon baik secara <i>offline/online</i>
		d	Website mkri.id		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan website mkri.id: <ul style="list-style-type: none"> - pembuatan <i>coding mock up</i> tampilan laman mkri
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	a	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi		<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan koordinasi dengan biro SDMO terkait analisis beban kerja dan peta jabatan untuk penugasan pegawai



		b	Pola Mutasi Internal			<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi pegawai yang di mutasi ke Pusat TIK
		c	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi			<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi hasil Penilaian pegawai
		d	Penetapan Kinerja Individu			<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan penilaian kinerja individu secara rutin
		e	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai			<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi hasil penegakkan disiplin pegawai Pusat TIK telah disusun oleh Biro SDMO
		f	Sistem Informasi Kepegawaian			<ul style="list-style-type: none"> • Update data informasi kepegawaian Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait kehadiran dan cuti telah dilakukan
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a	Keterlibatan Pimpinan			<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan unit kerja lain telah dilaksanakan dipimpin oleh Kepala Pusat TIK • Kepala Pusat TIK telah melakukan pemantauan/monitoring terhadap SKP Bulanan dan kinerja pegawai Pusat TIK • Dokumentasi rapat-rapat pimpinan
		b	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja			<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja telah dilakukan oleh Kepala Pusat TIK dan telah dilakukan koordinasi dengan Bagian Perencanaan



5	Penguatan Pengawasan	a	Pengendalian Gratifikasi			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi Mekanisme pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan bekerjasama dengan Inspektorat
		b	Penerapan SPIP			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi Mekanisme pengendalian resiko Pusat TIK telah dilaksanakan
		c	Pengaduan Masyarakat			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan pemantauan terkait pengaduan Masyarakat dan telah dilakukan koordinasi dengan inspektorat terkait pengelolaan tindak lanjut laporan yang masuk.
		d	Whistle-Blowing System			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi WBS telah dilaksanakan Evidence terkait WBS Tahun 2024 dalam proses permintaan ke inspektorat
		e	Penanganan Benturan Kepentingan			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi proses penanganan benturan kepentingan juga telah dilaksanakan bekerja sama dengan Inspektorat
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	a	Standar Pelayanan			<ul style="list-style-type: none"> Standar Pelayanan telah disusun
		b	Budaya Pelayanan Prima			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan bimbingan teknis penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
		c	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan survey dan e-Voting untuk penilaian kepuasan terhadap pelayanan Pusat TIK tahun sebelumnya



VI. PENUTUP

Hasil monitoring dan evaluasi periode bulan April ini, masih perlu dilengkapi dengan dokumen bukti dan data-data pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan Zona Integritas.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk bulan April 2024, semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Jakarta, 30 April 2024

Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,

Sigit Purnomo



Digital Signature
mk-151477269240709040107



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE BULAN MEI 2024

I. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi masih tetap mengerahkan seluruh perhatian dan tenaga pada penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif di bulan Mei 2024. Begitu pula dengan proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah menjadi komitmen Bersama seluruh pegawai di Pusat TIK. Proses Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Seperti bulan sebelumnya, Pusat TIK juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas tersebut yang dilakukan secara bertahap berdasarkan masing-masing komponen pengungkit sesuai dengan tim yang telah dibentuk. Kegiatan merupakan bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas. Laporan monitoring dan evaluasi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi periode bulan Mei 2024 disiapkan untuk diunggah pada Microsite Pustik (<https://pustik.mkri.id>) sebelum diajukan kepada Tim Penilai Internal (TPI), Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menyiapkan beberapa hal dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung untuk meningkatkan nilai dari hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas.



II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 90.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 68.1 Tahun 2024 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2024.

III. TUJUAN

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan;
2. Mengkoordinir percepatan implementasi progress pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sesuai target dalam rencana kerja;
3. Memastikan hambatan atau kendala atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah diselesaikan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;



IV. RUANG LINGKUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

A. Monitoring

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah rencana aksi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;

B. Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 6 Komponen Pengungkit:

1. Area Manajemen Perubahan;
2. Area Penataan Tata Laksana;
3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Area Penguatan Akuntabilitas;
5. Area Penguatan Pengawasan;
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



V. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE MEI 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR		PROSES		CATATAN
				SUDAH SELESAI	BELUM SELESAI	
1	Manajemen Perubahan	a	Penyusunan Tim Kerja			<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan ZI Pustik Tahun 2024 telah mendapat persetujuan dari Sekjen SK Tim telah ditandatangani Sekjen
		b	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas			<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana kerja Tim Pembangunan ZI telah disusun Target Prioritas, Rencana kerja dan target capaian kinerja masing-masing area telah dibahas dan disetujui
		c	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM			<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan Laporan monitoring dan evaluasi per bulan dan per triwulan sedang dalam tahap pembuatan
		d	Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja			<ul style="list-style-type: none"> Mendokumentasikan kegiatan agent of change telah dilakukan sebagai bukti hasil kinerja dan manajemen talenta



2	Penataan Tata Laksana	a	Standar Operasional Prosedur (SOP)		<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pusat TIK telah diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari
		b	konfirmasi kehadiran sidang para pihak secara <i>online</i> pada SIMPP baru		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring penggunaan : <ul style="list-style-type: none"> - pengisian layout bangku konfirmasi kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> - input data para pemohon secara <i>online</i> - kartu kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> - link untuk pengiriman kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> melalui WA
		c	Layout sidang otomatis generate berdasarkan plotting bangku ruang sidang pada SIMPP baru		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring penggunaan : <ul style="list-style-type: none"> - layout bangku sidang para pemohon baik secara <i>offline/online</i> - nomor bangku sidang para pemohon baik secara <i>offline/online</i>
		d	Website mkri.id		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi laman mkri baru
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	a	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi		<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan koordinasi dengan biro SDMO terkait analisis beban kerja dan peta jabatan untuk penugasan pegawai
		b	Pola Mutasi Internal		<ul style="list-style-type: none"> • Montoring dan evaluasi pegawai yang di mutasi ke Pusat TIK



		c	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi hasil Penilaian pegawai
		d	Penetapan Kinerja Individu		<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan penilaian kinerja individu secara rutin
		e	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi hasil penegakkan disiplin pegawai Pusat TIK telah disusun oleh Biro SDMO
		f	Sistem Informasi Kepegawaian		<ul style="list-style-type: none"> Update data informasi kepegawaian Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait kehadiran dan cuti telah dilakukan
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a	Keterlibatan Pimpinan		<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan unit kerja lain telah dilaksanakan dipimpin oleh Kepala Pusat TIK Kepala Pusat TIK telah melakukan pemantauan/monitoring terhadap SKP Bulanan dan kinerja pegawai Pusat TIK Dokumentasi rapat-rapat pimpinan
		b	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja telah dilakukan oleh Kepala Pusat TIK dan telah dilakukan koordinasi dengan Bagian Perencanaan
5	Penguatan Pengawasan	a	Pengendalian Gratifikasi		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi Mekanisme pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan bekerjasama dengan Inspektorat



		b	Penerapan SPIP			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi Mekanisme pengendalian resiko Pusat TIK telah dilaksanakan
		c	Pengaduan Masyarakat			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan pemantauan terkait pengaduan Masyarakat dan telah dilakukan koordinasi dengan inspektorat terkait pengelolaan tindak lanjut laporan yang masuk.
		d	Whistle-Blowing System			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi WBS telah dilaksanakan Evidence terkait WBS Tahun 2024 dalam proses permintaan ke inspektorat
		e	Penanganan Benturan Kepentingan			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi proses penanganan benturan kepentingan juga telah dilaksanakan bekerja sama dengan Inspektorat
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	a	Standar Pelayanan			<ul style="list-style-type: none"> Standar Pelayanan telah disusun
		b	Budaya Pelayanan Prima			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan bimbingan teknis penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
		c	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan survey dan e-Voting untuk penilaian kepuasan terhadap pelayanan Pusat TIK tahun sebelumnya



VI. PENUTUP

Hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Mei ini, masih perlu dilengkapi dengan dokumen bukti dan data-data pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan Zona Integritas.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk bulan Mei 2024, semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Jakarta, 31 Mei 2024

Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,

Sigit Purnomo



Digital Signature
mk-1475085605240709034601



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE BULAN JUNI 2024

I. LATAR BELAKANG

Pola kerja di Mahkamah Konstitusi telah berangsur kembali normal setelah berakhirnya masa penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif di bulan Juni 2024. Namun begitu, proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi masih butuh perjalanan panjang untuk bisa terselesaikan. Proses yang telah menjadi komitmen bersama seluruh pegawai di Pusat TIK Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Seperti bulan sebelumnya, Pusat TIK juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas tersebut yang dilakukan secara bertahap berdasarkan masing-masing komponen pengungkit sesuai dengan tim yang telah dibentuk. Kegiatan merupakan bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas. Laporan monitoring dan evaluasi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi periode bulan Juni 2024 disiapkan untuk diunggah pada Microsite Pustik (<https://pustik.mkri.id>) sebelum diajukan kepada Tim Penilai Internal (TPI), Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menyiapkan beberapa hal dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung untuk meningkatkan nilai dari hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas.



II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 90.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 68.1 Tahun 2024 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2024.

III. TUJUAN

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan;
2. Mengkoordinir percepatan implementasi progress pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sesuai target dalam rencana kerja;
3. Memastikan hambatan atau kendala atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah diselesaikan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;



IV. RUANG LINGKUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

A. Monitoring

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah rencana aksi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;

B. Evaluasi

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 6 Komponen Pengungkit:

1. Area Manajemen Perubahan;
2. Area Penataan Tata Laksana;
3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Area Penguatan Akuntabilitas;
5. Area Penguatan Pengawasan;
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



V. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE JUNI 2024

NO	KOMPONEN	INDIKATOR		PROSES		CATATAN
				SUDAH SELESAI	BELUM SELESAI	
1	Manajemen Perubahan	a	Penyusunan Tim Kerja			<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan ZI Pustik Tahun 2024 telah mendapat persetujuan dari Sekjen SK Tim telah ditandatangani Sekjen
		b	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas			<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rencana kerja Tim Pembangunan ZI telah disusun Target Prioritas, Rencana kerja dan target capaian kinerja masing-masing area telah dibahas dan disetujui
		c	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM			<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan Laporan monitoring dan evaluasi per bulan dan per triwulan sedang dalam tahap pembuatan
		d	Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja			<ul style="list-style-type: none"> Mendokumentasikan kegiatan agent of change telah dilakukan sebagai bukti hasil kinerja dan manajemen talenta



2	Penataan Tata Laksana	a	Standar Operasional Prosedur (SOP)		<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pusat TIK telah diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari
		b	konfirmasi kehadiran sidang para pihak secara <i>online</i> pada SIMPP baru		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring penggunaan : <ul style="list-style-type: none"> - pengisian layout bangku konfirmasi kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> - input data para pemohon secara <i>online</i> - kartu kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> - link untuk pengiriman kehadiran sidang para pemohon secara <i>online</i> melalui WA
		c	Layout sidang otomatis generate berdasarkan plotting bangku ruang sidang pada SIMPP baru		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring penggunaan : <ul style="list-style-type: none"> - layout bangku sidang para pemohon baik secara <i>offline/online</i> - nomor bangku sidang para pemohon baik secara <i>offline/online</i>
		d	Website mkri.id		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi laman mkri baru
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	a	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai untuk memenuhi kebutuhan jabatan telah dilakukan
		b	Pola Mutasi Internal		<ul style="list-style-type: none"> • Montoring dan evaluasi pegawai yang di mutasi ke Pusat TIK



		c	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi hasil Penilaian pegawai
		d	Penetapan Kinerja Individu		<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan penilaian kinerja individu secara rutin
		e	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai		<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil penegakkan disiplin pegawai Pusat TIK telah disusun oleh Biro SDMO./ Akan dilengkapi dokumen terkait inovasi yang telah dilakukan terkait aturan disiplin pegawai.
		f	Sistem Informasi Kepegawaian		<ul style="list-style-type: none"> Update data informasi kepegawaian Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait kehadiran dan cuti telah dilakukan
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a	Keterlibatan Pimpinan		<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan unit kerja lain telah dilaksanakan dipimpin oleh Kepala Pusat TIK Kepala Pusat TIK telah melakukan pemantauan/monitoring terhadap SKP Bulanan dan kinerja pegawai Pusat TIK Dokumentasi rapat-rapat pimpinan
		b	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja telah dilakukan oleh Kepala Pusat TIK dan telah dilakukan koordinasi dengan Bagian Perencanaan
5	Penguatan Pengawasan	a	Pengendalian Gratifikasi		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi Mekanisme pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan bekerjasama dengan Inspektorat



		b	Penerapan SPIP			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi Mekanisme pengendalian resiko Pusat TIK telah dilaksanakan
		c	Pengaduan Masyarakat			<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan pemantauan terkait pengaduan Masyarakat dan telah dilakukan koordinasi dengan inspektorat terkait pengelolaan tindak lanjut laporan yang masuk.
		d	Whistle-Blowing System			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi WBS telah dilaksanakan Evidence terkait WBS Tahun 2024 dalam proses permintaan ke inspektorat
		e	Penanganan Benturan Kepentingan			<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal telah dilakukan dengan Inspektorat dan Peraturan Sekjen tersebut telah ditandatangani Sosialisasi Peraturan terkait benturan kepentingan telah dilaksanakan dan proses penanganan benturan kepentingan telah dimulai. Monitoring dan evaluasi proses penanganan benturan kepentingan juga telah dilaksanakan bekerja sama dengan Inspektorat



6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	a	Standar Pelayanan		<ul style="list-style-type: none"> • Standar Pelayanan telah disosialisasikan dan telah dibuatkan maklumatnya pada laman resmi MKRI dan di microsite
		b	Budaya Pelayanan Prima		<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan telah disusun termasuk pemberian kompensasi bagi penerima layanan atas pelayanan yang di bawah standar • Telah dilakukan sosialisasi dan publikasi pelayanan publik Pusat TIK di berbagai media
		c	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan		<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan survey dan e-Voting untuk penilaian kepuasan terhadap pelayanan Pusat TIK tahun sebelumnya



VI. PENUTUP

Hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Juni ini, masih perlu dilengkapi dengan dokumen bukti dan data-data pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan Zona Integritas.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk bulan Juni 2024, semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Jakarta, 28 Juni 2024

Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,

Sigit Purnomo



Digital Signature
mk-387448336240709035824



RENCANA KERJA

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) &
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Konstitusi dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Salah satu rencana aksi dalam Reformasi Birokrasi di Mahkamah Konstitusi adalah Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2024, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi diusulkan sebagai unit kerja WBK/WBBM. Untuk mewujudkan WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, diperlukan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas.

Rencana Kerja ini memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM sebagai acuan dalam pencapaian setiap tahap pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi dan dokumen pendukung yang disajikan.

Akhir kata, kami berharap semoga dokumen rencana kerja ini dapat bermanfaat untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Jakarta, 5 Februari 2024
Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi
Sigit Purnomo



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu strategi pemerintah dalam menciptakan profesionalisme aparatur negara dan tata kelola pemerintahan yang baik. Urgensi pelaksanaan reformasi birokrasi adalah melakukan perubahan dan pembaharuan secara berkelanjutan pada birokrasi pemerintahan agar tumbuh menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien serta mempunyai pelayanan publik yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan cita-cita zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka Mahkamah Konstitusi perlu untuk menetapkan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan penetapan unit kerja untuk diusulkan. Penetapan unit kerja sebagai WBK/WBBM tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja-unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan Zona Integritas berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang meliputi 6 komponen pengungkit yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai salah satu unit kerja di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diusulkan menjadi unit kerja percontohan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam Pembangunan Zona Integritas. Sesuai dengan pedoman pembangunan Zona Integritas, maka Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menetapkan rencana kerja yang telah disusun sebagai salah satu langkah utama membangun unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

C. PENGERTIAN UMUM

1. Zona Integritas (ZI) di lingkungan Mahkamah Konstitusi adalah predikat yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada



unit kerja yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
4. Unit Kerja adalah serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
5. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK/WBBM.
6. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Penayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).



BAB II

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pembangunan Zona Integritas mempunyai 2 (dua) komponen yang harus dibangun yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat 2 komponen pengungkit yaitu Pemenuhan dan Reform yang masing-masing dibagi menjadi 6, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Komponen hasil terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu, Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, dan Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

A. KOMPONEN PENGUNGKIT

I. PEMENUHAN

1. Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas. Program Manajemen Perubahan memiliki rencana aksi dengan indikator sebagai berikut:

i. Penyusunan Tim Kerja

Tim Kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses perubahan melalui program, kegiatan, dan inovasi di 6 Area Perubahan (6 komponen pengungkit) Zona Integritas, dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu:

- a. Rapat pembentukan Tim Kerja;
- b. Pengajuan Nota Dinas SK Tim Pembangunan Zona Integritas;
- c. Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas.

ii. Rencana Pembangunan Zona Integritas

Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas adalah program kegiatan dan inovasi yang akan dilaksanakan dalam melakukan perubahan yang berisi target(sasaran), rencana kegiatan, waktu, dan hasil yang ingin dicapai, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Membuat dokumen rencana aksi/rencana kerja pembangunan Zona



- Integritas, dan dengan menentukan target prioritas;
- b. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas yang melalui kegiatan:
 - 1) Sosialisasi pada pegawai Pusat TIK
 - 2) Sosialisasi pada mitra kerja Pusat TIK
 - 3) Pernyataan Komitmen Integritas.

iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara terus menerus pada tiap-tiap komponen untuk memastikan bahwa pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah di rencanakan sebelumnya. Rencana kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi:

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas;
- b. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas.

iv. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota ke arah yang lebih baik dengan menerapkan budaya kerja dan nilai-nilai organisasi melalui upaya:

- a. Penetapan Role Model;
- b. Menerapkan nilai-nilai budaya kerja atau nilai-nilai organisasi;
- c. Menandatangani Pakta Integritas;
- d. Menetapkan Agen Perubahan;
- e. Melibatkan anggota organisasi dalam pembangunan ZI.

Melalui indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran sebagai upaya dalam pencapaian target pelaksanaan program manajemen perubahan. Adapun target yang ingin dicapai melalui program Manajemen Perubahan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

2. Penataan Tata Laksana

Penataan Tata Laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada ZI menuju WBK/WBBM. Program Penataan Tata Laksana memiliki rencana aksi dengan indikator sebagai berikut:

i. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama

Pengukuran SOP ini dilakukan dengan mengacu pada peta bisnis proses Mahkamah Konstitusi dan kondisi yang seharusnya telah dilakukan seperti:

- a. Melakukan review SOP Pusat TIK terhadap Peta Proses Bisnis MK;
- b. Menerapkan SOP dalam pekerjaan sehari-hari;



- c. Melaksanakan evaluasi SOP.

ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penggunaan teknologi dalam pengukuran kinerja, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), dan pelayanan publik yang selama ini telah dilakukan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, seperti:

- a. Menerapkan penilaian kinerja pegawai Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi menggunakan teknologi sistem informasi;
- b. Menerapkan penggunaan teknologi dalam akses operasional manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian pelayanan publik di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

iii. Keterbukaan Informasi Publik

Rencana aksi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik meliputi:

- a. Melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik;
- b. Monitoring dan Evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik unit Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Melalui indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran sebagai upaya dalam pencapaian target pelaksanaan program Penataan Tata Laksana. Adapun target yang ingin dicapai melalui program Penataan Tata Laksana adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas SDM pada pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Program Penataan Sistem Manajemen SDM memiliki rencana aksi dengan indikator sebagai berikut:

i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

- a. Melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) terkait hasil analisis beban kerja dan peta jabatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) data penempatan pegawai disesuaikan kebutuhan tiap jabatan;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi.

ii. Pola Mutasi Internal

- a. Menghimpun data mutasi di lingkungan Pusat TIK;
- b. Menyusun data pemetaan kompetensi pegawai;



- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi terkait dengan perbaikan kinerja;
- d. Memutakhirkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pusat TIK.

iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

- a. Menyusun analisis kebutuhan diklat untuk pengembangan kompetensi pegawai Pusat TIK;
- b. Menyusun usulan terkait rencana pengembangan kompetensi;
- c. Menyusun dokumen presentase kesenjangan kompetensi pegawai;
- d. Menginventarisir pelaksanaan diklat yang sudah diikuti pegawai Pusat TIK;
- e. Melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) terkait pengembangan kompetensi Pegawai Pusat TIK;
- f. Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai yang sudah mengikuti diklat terhadap perbaikan kinerja.

iv. Penetapan Kinerja Individu

- a. Menyusun Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi pegawai;
- b. Menyusun cascading kinerja pegawai Pusat TIK;
- c. Melaksanakan penilaian kinerja individu secara online (SKP) dan berkala setiap bulan;
- d. Melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) terkait pemberian reward terhadap hasil penilaian kinerja individu.

v. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

- a. Melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) terkait laporan disiplin pegawai Pusat TIK;
- b. Melaksanakan sosialisasi disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai terbaru;
- c. Membuat mekanisme pemilihan Pegawai Teladan.

vi. Sistem Informasi Kepegawaian

Melakukan update data informasi kepegawaian Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Melalui indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran sebagai upaya dalam pencapaian target pelaksanaan program penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Adapun target yang ingin dicapai melalui program penataan sistem manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Meningkatnya disiplin SDM di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
5. Meningkatnya profesionalisme SDM di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



4. Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada unit kerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Program Akuntabilitas Kinerja memiliki rencana aksi dengan indikator sebagai berikut:

i. Keterlibatan Pimpinan

- a. Melibatkan pimpinan dalam perencanaan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Melibatkan pimpinan dalam penyusunan penetapan kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Melakukan pemantauan pencapaian kinerja pegawai Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

- a. Menyusun dokumen perencanaan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Mengumpulkan dokumen perencanaan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berorientasi hasil;
- c. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- d. Menyusun dokumen terkait hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Menyusun laporan kinerja tepat waktu;
- f. Mengajukan usulan peningkatan kompetensi bagi SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
- g. Penunjukan SDM yang kompeten untuk menyusun Laporan Kinerja.

Melalui indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran sebagai upaya dalam pencapaian target pelaksanaan program Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Adapun target yang ingin dicapai melalui Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
2. Meningkatnya akuntabilitas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

5. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan ditujukan agar penyelenggaraan unit kerja bersih dan bebas KKN. Program Penguatan Pengawasan memiliki rencana aksi dengan indikator sebagai berikut:

i. Pengendalian Gratifikasi

- a. Melaksanakan *public campaign* pengendalian gratifikasi;
- b. Melaksanakan pengendalian gratifikasi.

ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

- a. Melaksanakan pengendalian di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Menyusun penilaian resiko kebijakan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Melaksanakan pengendalian resiko Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan SPIP.



iii. Pengaduan Masyarakat

- a. Membuka jalur pengaduan masyarakat unit kerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat;
- d. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.

iv. Whistle-Blowing System

- a. Melaksanakan sosialisasi whistle-blowing system Mahkamah Konstitusi;
- b. Melaksanakan penerapan whistle-blowing system;
- c. Melaksanakan evaluasi atas penerapan whistle-blowing system;
- d. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle-blowing system.

v. Penanganan Benturan Kepentingan

- a. Melakukan identifikasi benturan kepentingan;
- b. Melaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan;
- c. Melaksanakan penanganan benturan kepentingan;
- d. Melaksanakan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan;
- e. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan.

Melalui indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran sebagai upaya dalam pencapaian target pelaksanaan program Penguatan Pengawasan. Adapun target yang ingin dicapai melalui program Penguatan Pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
3. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga diperlukan untuk dapat membangun *Public Trust* terhadap penyelenggara pelayanan publik. Program Penguatan Kualitas Pelayanan Publik memiliki rencana aksi dengan indikator sebagai berikut:

i. Standar Pelayanan

- a. Menyusun standar pelayanan Pusat TIK;
- b. Memaklumkan standar pelayanan Mahkamah Konstitusi;
- c. Mendokumentasikan SOP sesuai dengan standar pelayanan;
- d. Melaksanakan reviu standar pelayanan dan SOP.

ii. Budaya Pelayanan Prima

- a. Melaksanakan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima;
- b. Menampilkan pelayanan publik Pusat TIK di berbagai media;
- c. Menetapkan sistem reward dan punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;



- d. Melaksanakan proses pelayanan Pusat TIK secara terpadu;
- e. Melaksanakan inovasi pelayanan.

iii. Pengelolaan Pengaduan

- a. Membuat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor;
- b. Menetapkan unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan;
- c. Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi.

iv. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

- a. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- b. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat secara terbuka;
- c. Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat.

v. Pemanfaatan Teknologi Informasi

- a. Menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan;
- b. Membangun database pelayanan yang terintegrasi;
- c. Melakukan perbaikan secara terus menerus.

Melalui indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran sebagai upaya dalam pencapaian target pelaksanaan penguatan kualitas pelayanan publik. Adapun target yang ingin dicapai melalui program penguatan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

II. REFORM

1. Manajemen Perubahan

i. Komitmen dalam perubahan

- a. Membuat perubahan yang konkret di Instansi;
- b. Perubahan yang dibuat telah terintegrasi dalam sistem manajemen.

ii. Komitmen pimpinan

- Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan.

iii. Membangun budaya kerja

- Membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

2. Penataan Tata Laksana

i. Peta proses bisnis mempengaruhi

- Menyusun peta proses bisnis.

ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

- a. Mengimplementasikan SPBE yang terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien;
- b. Mengimplementasikan SPBE yang terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien.

iii. Transformasi digital memberikan nilai manfaat



- a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal;
- b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal;
- c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

i. Kinerja individu

- Ukuran kinerja individu berorientasi hasil (*outcome*) sesuai pada levelnya

ii. Assessment pegawai

- Hasil assessment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai

iii. Pelanggaran disiplin pegawai

- Penurunan pelanggaran disiplin pegawai

4. Penguatan Akuntabilitas

i. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja

- Persentasi sasaran dengan capaian 100% atau lebih

ii. Pemberian reward dan punishment

- Hasil capaian/monitoring perjanjian kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi

iii. Kerangka logika kinerja

- Terdapat perjanjian kinerja (kerangka logika kerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai

5. Penguatan Pengawasan

i. Mekanisme pengendalian

- Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktifitas secara berjenjang

ii. Penanganan pengaduan masyarakat

- Persentase penanganan pengaduan masyarakat

iii. Penyampaian laporan harta kekayaan

- Penyampaian laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN)
- Penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN)

6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

i. Upaya dan/atau inovasi pelayanan publik

- Upaya dan/atau inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan publik
- Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah

ii. Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi

- Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab

A. KOMPONEN HASIL



Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada duasasaran utama, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:

- a. Nilai persepsi korupsi (survey eksternal); dan
- b. Capaian kinerja lebih baik dari pada capaian kinerja sebelumnya.

2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima

Sasaran pelayanan publik yang prima diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal pelayanan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi).



BAB III PENUTUP

Outcome dari upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas adalah terbentuknya WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengembangan WBK dan WBBM secara bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai IPK Mahkamah Konstitusi khususnya dan IPK Indonesia umumnya.

Rencana aksi ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan yang memuat indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK dan WBBM yang diyakini semakin mengarah kepada zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi.

Perjalanan masih panjang, butuh kerja keras dan komitmen bersama-sama untuk menjadikan Mahkamah Konstitusi RI bersih dari korupsi dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.





**Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia**

Supported by :



Project Documentation

Perancangan dan pengembangan antarmuka laman mkri.id

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Ringkasan Proyek	3
Nama	3
Deskripsi	3
Tujuan	3
Lingkup	3
Pengembang	4
Referensi Dokumen Digital	4
Timeline	5
Fase	5
UI/UX Design	5
Front-end Development & Integration	5
Testing	6
Production Deployment	6
Documentation & Handover	6
Progress Proyek	7
7 Maret 2024	7
8 Maret 2024	7
13 Maret 2024	7
15 Maret 2024	7
19 Maret 2024	7
25 Maret 2024	8
26 Maret 2024	8
28 Maret 2024	8
01 April 2024	8
03 April 2024	8
04 April 2024	8
05 April 2024	8
Perubahan Desain	9
Beranda	9
Video MKRI	12
Pengaduan	13
Pengaduan - Kirim Surat	14
Berita MKRI	15
Unit Kerja	17
Peradilan	18

Peradilan - Struktur Organisasi	19
Peradilan - Profil MKMK	21
Peradilan - Jadwal Sidang MKMK	22
Hakim	23
Perkara	24
Perkara - Jadwal Sidang	25
Perkara - Rekapitulasi PHPU	26
Administrasi Umum - Informasi Anggaran	27
Administrasi Umum - LHKPN	28
Administrasi Umum - Statistik Pegawai	29
Administrasi Umum - Kerjasama	30
Publikasi - Majalah Konstitusi	31
Pilkada Serentak	32
Dokumentasi Teknis	33
Framework & Libraries	33
Struktur Kode	34
Pengaturan Dasar	34
Struktur Folder Utama (folder src)	34
Folder App	36
Menyajikan Tampilan	37
File Layout	37
Konvensi Kode	37
Hasil Pengujian	38
Penutupan & Garansi	49

Ringkasan Proyek

Nama

Perancangan dan pengembangan antarmuka laman mkri.id.

Deskripsi

Perancangan tampilan baru dan pengembangan antarmuka depan (front-end) website mkri.id responsif terhadap mobile & desktop dengan teknologi React.js.

Tujuan

Berdasar pada Surat Pesanan Pengadaan Pengembangan Website mkri.id Tahun Anggaran 2024 nomor 69.5/PBJ/MK/2024 tanggal 08 Maret 2024.

Lingkup

Lingkup daripada proyek ini berdasar pada Kerangka Acuan Kerja yang telah diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Membuat pembaruan desain tata letak, warna, ikon, dan elemen desain website mkri.id dengan syarat tidak menghilangkan fitur yang sudah ada;
2. Mengembangkan antarmuka depan (Front-end development) dengan menggunakan framework Next.js;
3. Memastikan responsivitas dan kecepatan optimal untuk pengalaman pengguna yang lebih baik;
4. Menghubungkan front-end yang telah dikembangkan dengan back-end yang disediakan oleh tim internal MK;
5. Menambahkan fitur pencarian putusan dan konten website dari sisi desain dan antarmuka depan;
6. Mengintegrasikan fitur pencarian dengan bagian server;
7. Melaksanakan uji integrasi secara menyeluruh untuk memastikan semua komponen berinteraksi secara efektif;
8. Identifikasi dan perbaiki potensi masalah integrasi sebelum implementasi di lingkungan produksi;
9. Memastikan sistem beroperasi sesuai dengan harapan;
10. Menyusun dokumentasi tentang perubahan desain dan implementasi teknologi antarmuka;
11. Memberikan pelatihan terkait teknologi baru kepada tim terkait.
12. Maintenance selama 6 bulan.

Pengembang

Pengembang atau penyedia adalah PT. Iterasi Inovasi Teknologi, beralamat di MTH Square Ground Floor A4/A, Jl. Letjen MT Haryono, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, merupakan sebuah perusahaan yang melakukan aktivitas jasa teknologi informasi pemrograman dengan NIB: 0411230067394.

Perusahaan telah menetapkan 5 orang dalam proyek ini sebagai tim pengembang, dengan detail:

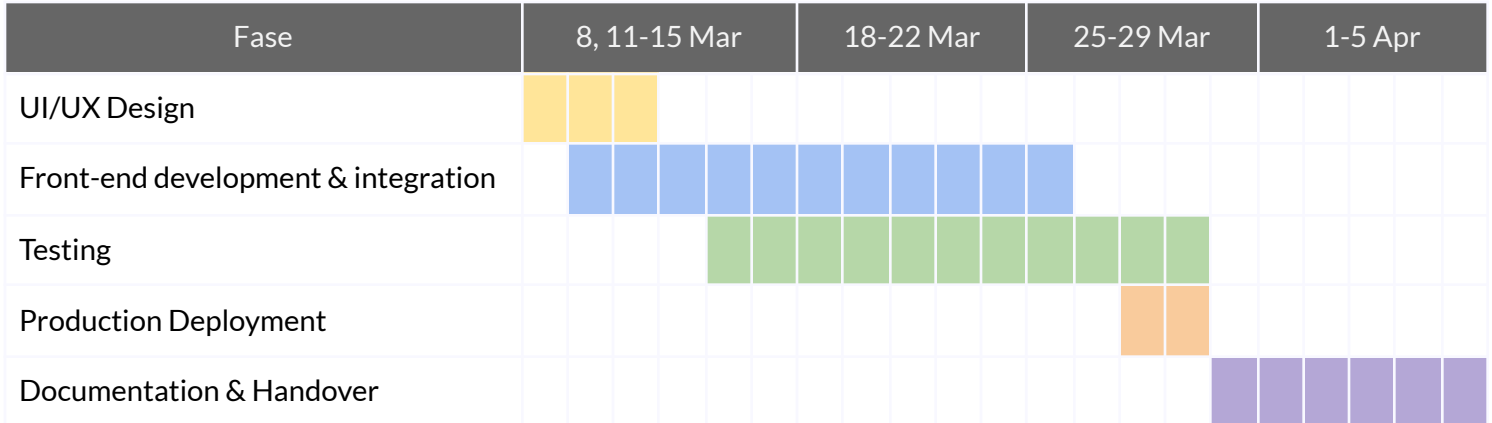
1. Luthfi Hariz, selaku Project Manager
2. Labib Imam Hidayat, selaku Lead Front-end Engineer
3. Kevin Ryan Hadi, selaku Lead UI/UX Designer
4. Anton Martono, selaku UI/UX Designer
5. Agung Nugraha, selaku Front-end Engineer

Referensi Dokumen Digital

No	Dokumen	Tautan
1	File Desain Figma	https://bit.ly/mkri-id-figma
2	Source Code	https://gitlab.mkri.id/luthfi/mkri-id-frontend
3	Petunjuk Instalasi	https://gitlab.mkri.id/luthfi/mkri-id-frontend/-/blob/main/README.md
4	Kontrak Integrasi API	https://docs.google.com/document/d/1BbVhvw_hmYm1Na45ilFcbzrwQVrwln_6PdGil-2Rf08/edit?usp=sharing

Timeline

Proyek dimulai pada 8 Maret 2024 dan selesai pada 5 April 2024, dengan masa maintenance selama 6 bulan, atau hingga 5 Oktober 2024.



Fase

UI/UX Design

Membuat pembaruan desain tata letak, warna, ikon, dan elemen desain website mkri.id dengan syarat tidak menghilangkan fitur yang sudah ada. Output berupa desain baru website mkri.id dalam format file Figma.

Front-end Development & Integration

1. Mengembangkan antarmuka depan (Front-end development) dengan menggunakan framework Next.js;
2. Memastikan responsivitas dan kecepatan optimal untuk pengalaman pengguna yang lebih baik;
3. Menghubungkan front-end yang telah dikembangkan dengan back-end yang disediakan oleh tim internal MK;
4. Menambahkan fitur pencarian putusan dan konten website dari sisi desain dan antarmuka depan;
5. Mengintegrasikan fitur pencarian dengan bagian server;

Output berupa source code front-end yang sudah terintegrasi dengan back-end yang disediakan oleh PusTIK MK, dan versi testing dari website terbaru mkri.id.

Testing

1. Melaksanakan uji integrasi secara menyeluruh untuk memastikan semua komponen berinteraksi secara efektif;
2. Identifikasi dan perbaiki potensi masalah integrasi sebelum implementasi di lingkungan produksi;
3. Memastikan sistem beroperasi sesuai dengan harapan;

Output berupa dokumentasi rencana pengujian dan juga hasil pengujian, serta website terbaru mkri.id yang siap untuk dirilis secara publik atau *production ready*.

Production Deployment

Proses mengunggah versi final dari website mkri.id terbaru ke lingkungan produksi agar dapat diakses dan digunakan oleh pengguna secara luas.

Output dari fase ini berupa mkri.id dengan desain dan teknologi terbaru.

Documentation & Handover

1. Menyusun dokumentasi tentang perubahan desain dan implementasi teknologi antarmuka;
2. Memberikan pelatihan terkait teknologi baru kepada tim terkait.

Output berupa dokumen dan pelatihan terkait.

Progress Proyek

7 Maret 2024

1. Kick off meeting dilakukan via Zoom
2. Project adalah perancangan dan pengembangan antarmuka laman mkri.id, dengan ruang lingkup yang tertera pada Kerangka Acuan Kerja.

8 Maret 2024

1. Berdasarkan kontrak, proyek secara resmi telah dimulai
2. Design guideline untuk website baru mkri.id sudah tersedia di file Figma
3. Memulai fase front-end development

13 Maret 2024

1. Integrasi dengan backend mulai dilakukan
2. Versi testing sementara dari website mkri.id dapat diakses di <https://mkri-id.onrender.com/>
3. Beberapa feedback terkait API untuk keperluan integrasi sudah disampaikan dan dicatat di dokumen MKRI.id Integrasi dan Test Plan
4. Finalisasi API akan dilakukan dalam 2 hari kedepan oleh tim IT MK
5. Terkait persiapan testing: deployment ke internal testing server MK sudah bisa dilakukan, langkah deployment tersedia di file README.md repository Gitlab MKRI

15 Maret 2024

1. Dilakukan rapat teknis via Zoom untuk membahas integrasi dan juga proses testing
2. Progress pengerjaan front-end 85%, proses testing sudah berjalan sekitar 50%.
3. Versi website mkri.id terbaru sudah tersedia di internal testing server MK yang bisa diakses melalui <https://testing.mkri.id>

19 Maret 2024

1. Proses testing mencapai 90%, dengan beberapa feedback terkait back-end dan juga front-end.
2. Direncanakan untuk melakukan presentasi ke hadapan pak Sekjen terkait hasil implementasi terbaru dari mkri.id, namun tertunda.
3. Menerima feedback terkait hasil implementasi terbaru yang terdokumentasi di link berikut <https://docs.google.com/document/d/15PA51egZ8isw2u52fRzT4yHGWWZSNbxxkdsbgMiMeu8/edit>

25 Maret 2024

1. Semua feedback selesai, kecuali fitur pencarian, karena menunggu proses pembuatan API dari backend selesai.
2. Menerima beberapa feedback lainnya terkait desain kemudian diselesaikan dalam hari yang sama.

26 Maret 2024

1. API pencarian sudah tersedia di backend, front-end mulai melakukan integrasi dan penyesuaian API.

28 Maret 2024

1. Fitur pencarian sudah berhasil terintegrasi dan tersedia di website testing.mkri.id

01 April 2024

1. Melakukan presentasi di hadapan Sekjen MK terkait website baru.
2. Menerima beberapa feedback terkait website baru:
 - a. Pilih bahasa agar dipindah ke atas
 - b. Tulisan perkara dan website agar dibuat lebih besar dengan logo kaca pembesar
 - c. Grafik informasi anggaran agar dibuat gradasi dan menyesuaikan nilainya
 - d. 3 tombol pilkada, pilpres dan puu di beranda agar dibuat gradasi tampak seperti background pengumuman
3. Perlunya dilakukan sosialisasi terhadap website baru dengan menampilkan banner di website lama mkri.id sebelum benar-benar mengganti mkri.id dengan laman baru.
4. Dilakukan nya sosialisasi

03 April 2024

1. Semua feedback dari Sekjen MK sudah selesai dan sosialisasi terhadap website baru siap dilakukan.
2. Menemukan beberapa *bug* di fitur pilih bahasa yang perlu diperbaiki dari sisi *front-end*

04 April 2024

1. *Bug* berhasil diperbaiki, serah terima siap dilakukan.

05 April 2024

1. Serah terima secara administratif telah dilakukan, termasuk *source code* dan juga dokumentasi proyek.
2. Masa maintenance dimulai dan akan berakhir pada 5 Oktober 2024.

Perubahan Desain

Beranda

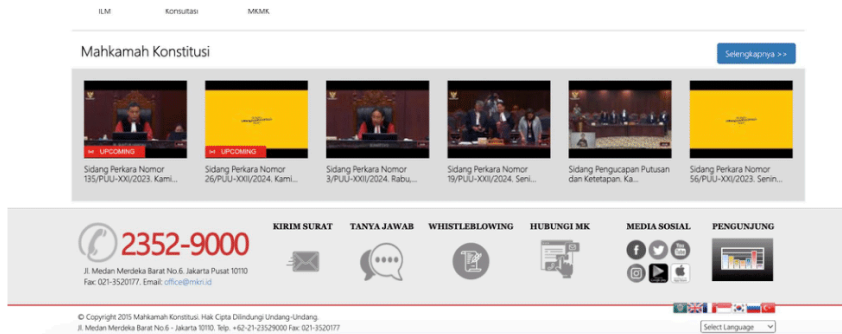
Before

The screenshot shows the old homepage of the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. The layout is somewhat cluttered with a large central banner for a public catalog launch, a calendar for March 2024, and several news snippets. The navigation menu is located at the top and includes categories like BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and UNIT KERJA. The overall design is functional but lacks a modern, clean aesthetic.

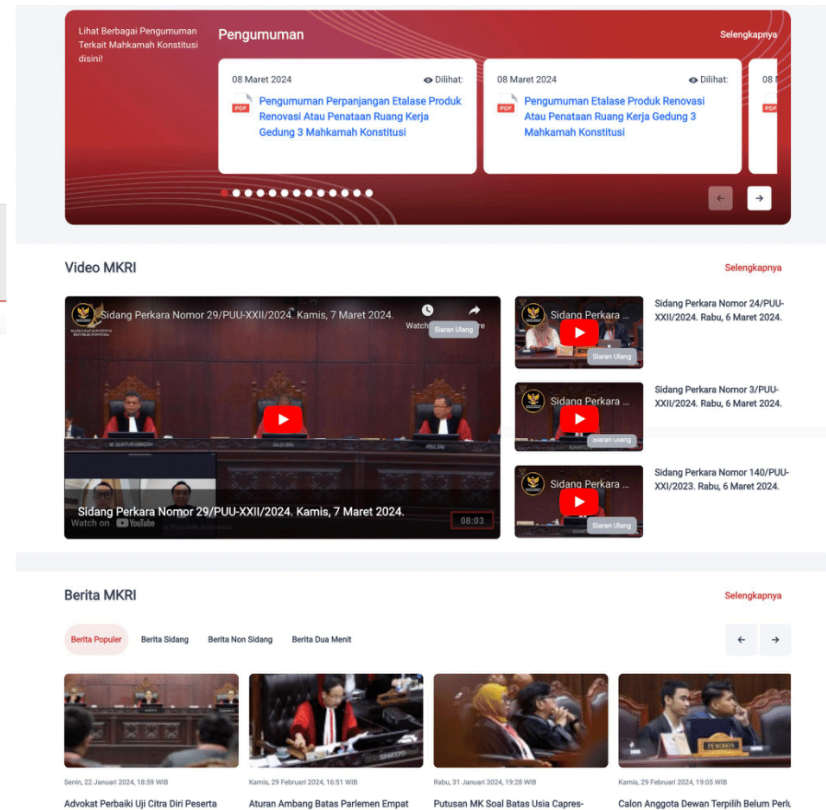
After

The screenshot shows the new, redesigned homepage of the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. The design is significantly more modern and user-friendly. It features a clean layout with a prominent header, a navigation menu, and a central focus on public service information. The new design includes a search bar, a calendar for March 2024, and several service-oriented buttons like 'Permohonan Online' and 'Pengkajian UUD & SKLN'. The overall aesthetic is professional and accessible.

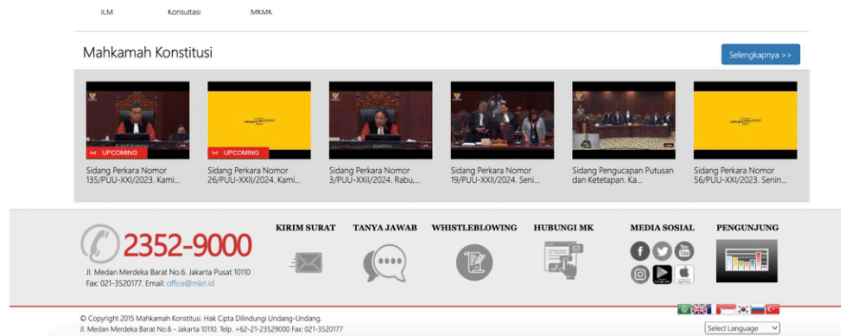
Before



After



Before



After



Video MKRI

Before

The screenshot shows the old website layout. At the top, there is a header with the date 'Jumat, 08 Maret 2024', a search bar, and the logo of the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Below the header is a navigation menu with categories: BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and UNITY KERJA. A sidebar on the left lists 'VIDEO CONFERENCE' with sub-items: LIVE STREAMING, JADWAL KUNJUNGAN MKRI, JADWAL KUNJUNGAN MKRI, and PENGELOLAAN VICON. The main content area features a large image of a courtroom and a video player titled 'LIVE STREAMING DAN VIDEO CONFERENCE' showing a live session of 'Sidang Perkara Nomor 135/PUU-XXI/2023, Kamis, 7 Maret 2024' with a speaker 'M. GUNTUR HAMZAH'. Below the video player are four tabs labeled 'Kanal 1' through 'Kanal 4'. At the bottom, there is a map titled 'LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA'.

After

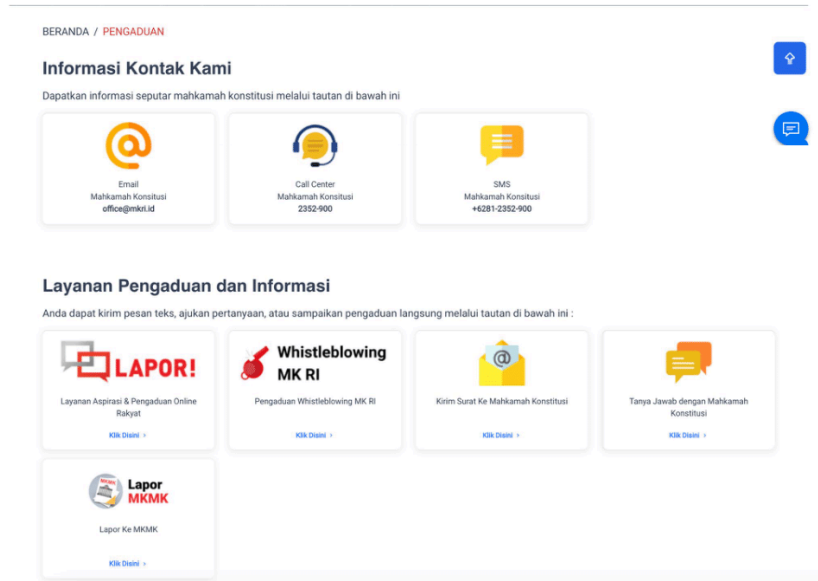
The screenshot shows the new website layout. The header includes the logo and name 'Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia', a search bar, and a 'Menu Internal' button. The navigation menu is simplified to: BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and PUBLIKASI. The main content area features a large dark banner with the text 'Video MKRI' and a red bar below it. Below the banner is a section with a 'Live Streaming' button and links for 'Jadwal Kunjungan MKRI', 'Jadwal Kuliah Umum', and 'Pengelolaan Vicon'. The main content area is titled 'Live Streaming Dan Video Conferene' with a 'Watch on Youtube' button. Below this is a section titled 'Tata Cara Pelayanan Persidangan Jarak Jauh Melalui Video Conference' with a list of 'Ruang Sidang' (Court Rooms) 1 through 4. A large grey box contains the message 'Saat ini video livestreaming tidak tersedia.' (Live streaming is currently unavailable).

Pengaduan

Before



After



Pengaduan - Kirim Surat

Before

The screenshot shows the old website interface for the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. The header includes the date 'Kamis, 08 Maret 2024' and a language selector for 'English'. The main navigation bar contains links for BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and UNIT KERJA. The left sidebar lists various categories such as PERADILAN, DEWAN ETIK, MAJELIS KEHORMATAN MK, and KODE ETIK (SAPTA KARSAS HUTAMA). The main content area features a banner with the court's logo and the text 'LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI'. Below the banner, there is a section titled 'KIRIM SURAT' with a 'Catatan' (Note) section and a form for sending letters. The form includes fields for Name, Email, Phone, and Isi Surat, along with a file upload section and a 'Kirim' button.

After

The screenshot shows the new website interface for the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. The header includes the court's name and a language selector for 'English'. The main navigation bar contains links for BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and PUBLIKASI. The main content area features a large banner with the text 'Kirim Surat'. Below the banner, there is a section titled 'Kirim Surat ke Mahkamah Konstitusi' with a 'Catatan' (Note) section and a form for sending letters. The form includes fields for Name, Email, Phone, and Isi Surat, along with a file upload section and a 'Kirim' button. The interface is more modern and user-friendly, with a clear call to action and a streamlined layout.

Berita MKRI

Before

The screenshot shows the old website layout. At the top, there is a date 'Jumat, 08 Maret 2024' and a language selector 'English'. The main header features the Garuda logo and the text 'MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA' and 'LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI'. Below this is a navigation bar with categories: BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and UNIT KERJA. The main content area is divided into 'BERITA POPULER' and 'BERITA SIDANG'. The 'BERITA SIDANG' section features a large article titled 'Saksi Pasangan Aria-Erina Ungkap Politik Uang dalam Pilkada Pesisir Barat' with a video player. Below this are 'TERKINI' news items, including 'Komisisioner KPID Perbaiki Uji Masa Jabatan dalam UU Penyelaran' and 'Perfudem Tarik Permohonan Uji Pelaksanaan Pilkada'. At the bottom, there is a footer with contact information: '2352-9000', 'KIRIM SURAT', 'TANYA JAWAB', 'WHISTLEBLOWING', 'HUBUNGI MK', 'MEDIA SOSIAL', and 'PENGUNJUNG'. A copyright notice at the very bottom reads 'Copyright 2015 Mahkamah Konstitusi. Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang'.

After

The screenshot shows the new website layout. At the top, there is a date '08 Mar 2024' and a language selector 'English'. The main header features the Garuda logo and the text 'Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia'. Below this is a navigation bar with categories: BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and PUBLIKASI. The main content area is dominated by a large dark banner with the text 'Berita MKRI' and a Garuda logo. Below the banner is a search bar and a date filter '08 Mar 2024 Sampai 08 Mar 2024'. The main content area is divided into 'Berita Populer', 'Berita Sidang', 'Berita Non Sidang', and 'Berita Dua Menit'. The 'Berita Populer' section features a grid of news items, each with a thumbnail image and a title, such as 'Advokat Perbaiki Uji Citra Diri Peserta Pemilu', 'Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat...', 'Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Final dan Mengikat', and 'Calon Anggota Dewan Terpilih Belum Perlu Undur Diri Saat Maju Pilkada'. At the bottom, there is a footer with contact information: '2352-9000', 'KIRIM SURAT', 'TANYA JAWAB', 'WHISTLEBLOWING', 'HUBUNGI MK', 'MEDIA SOSIAL', and 'PENGUNJUNG'. A copyright notice at the very bottom reads 'Copyright 2015 Mahkamah Konstitusi. Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang'.

Before

Senin, 08 Maret 2024 English

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI**

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

BERANDA > BERITA SINGKAT > SAKSI PASANGAN ARIA-ERLINA UNGKAP POLITIK UANG DALAM PILKADA PESIR BARAT

BERITA POPULER Selengkapnya >

Senin, 22 Januari 2024 | 18:59 WIB
Advokat Perbaiki Uji Citra Diri Peserta Pemilu

Hutan Ambang Putusan MK Soal Calon Anggota Dewan Terpilih Batas Usia Capres-Cawapres Empat Perlu Belum Perlu

BERITA

Saksi Pasangan Aria-Erlina Ungkap Politik Uang dalam Pilkada Pesisir Barat

Rabu, 24 Februari 2021 | 19:32 WIB Video Cetak Dibaca: 1840591



Para saksi Pemohon, Sukma Sarjaya (tengah) dan Siti, menyampaikan kesaksian dalam sidang pembuktian perkara PHP Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (24/2/2021) sore. Paslon Nomor Urut 2 Aria Lukita Budawan dan Erlina (Pemohon Perkara 39/PH-UBUP-XIX/2020) menghadirkan sejumlah saksi.

Saksi Pemohon, Sukma Sarjaya anggota KPSS di TPS 05 Ulok Mukti, Kecamatan Ngambus, menerangkan terdapat DPT sebanyak 334 pemilih dan kertas suara yang diterima 344 kertas suara pada TPS 05 Pklok Ulok Mukti. Sukma mengaku diangkat menjadi anggota KPSS oleh ketua KPSS, Sukma menjelaskan, dalam SK diketahui seluruhnya yang menjadi ketua TPS 05 adalah Ai Inony, tapi dalam pelaksanaannya bukan. Namun Sukma tidak tahu alasan penggantian ketua TPS 05. Sukma juga mengungkapkan tidak ada daftar hadir pemilih di TPS 05 Ulok Mukti pada hari pencoblosan, 9 Desember 2020.

"Tetapi setelah penghitungan suara dan ketiga saksi dari para pasangan calon maupun anggota KPSS sudah menandatangani berita penetapan penghitungan suara, daftar hadir itu dilemukan," kata Sukma yang merasa heran dengan kejadian tersebut.

Saat hari pencoblosan, Sukma bertugas mengecek suhu tubuh terkait protokol kesehatan Covid-19 terhadap semua orang yang hadir. Ketika itu Sukma tidak melakukan pemeriksaan identitas para pemilih ataupun surat undangan memilih, karena menurutnya sudah ada orang lain yang bertugas menanganinya. Usai pencoblosan, Sukma menuturkan bahwa Ai Amin selaku pemangku (kepala dusun) di lokasi TPS 05 menyampaikan dirinya membagi-bagikan uang kepada para pemilih agar mencoblos. Paslon Nomor Urut 3

120k Shares

After

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia English Menu Internal

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM PUBLIKASI



Ketua MK Suhartoyo didampingi Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur memimpin persidangan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), diruang sidang panel MK, Senin (22/1/2024) dengan agenda sidang perbaikan permohonan. Foto: Humas/Panji

BERANDA / BERITA / ADVOKAT PERBAIKI UJI CITRA DIRI PESERTA PEMILU

Senin, 22 Januari 2024 | 18:59 @ Dibaca: 101911

Advokat Perbaiki Uji Citra Diri Peserta Pemilu Print

JAKARTA, HUMAS MKRI – Pemohon Nomor 166/PUU-XU/2023 dalam perkara pengujian ketentuan mengenai citra diri peserta pemilu dalam Pasal 1 angka 35, Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) membacakan perbaikan permohonannya dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (22/1/2024). Permohonan ini diajukan seorang advokat bernama Gugum Rido Putra.

Pemohon dalam perbaikan permohonannya mengubah batu uji. "Batu uji yang kami ubah menjadi Pasal 28F dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945," ujar kuasa hukum Pemohon, M. Iqbal Samaran Putra di hadapan Majelis Sidang Panel yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi

Unit Kerja

Before

Senin, 08 Maret 2024

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

BERANDA-UNIT KERJA

- Kepaniteraan
- Biro Perencanaan dan Keuangan
- Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
- Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
- Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Biro Umum
- Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelola Perpustakaan
- Inspektorat

2352-9000 KIRIM SURAT TANYA JAWAB WHISTLEBLOWING HUBUNGI MK MEDIA SOSIAL PENGUNJUNG

After

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

English Menu Internal

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM PUBLIKASI

BERANDA / UNIT KERJA

Aplikasi Internal

- KEPANITERAAN**
merupakan unit kerja yang berada di bawah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
[Selengkapnya](#)
- BIRO RENKEU**
merupakan unit kerja yang berada di bawah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
[Selengkapnya](#)
- BIRO SDMO**
merupakan unit kerja yang berada di bawah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
[Selengkapnya](#)
- BIRO HAK**
merupakan unit kerja yang berada di bawah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
[Selengkapnya](#)
- BIRO HP**
merupakan unit kerja yang berada di bawah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
[Selengkapnya](#)
- BIRO UMUM**
merupakan unit kerja yang berada di bawah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
[Selengkapnya](#)
- PUSTIK**
merupakan unit kerja yang berada di bawah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
[Selengkapnya](#)
- PUSDIK MK**
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
[Selengkapnya](#)
- PUSLITKA**
merupakan unit kerja yang berada di bawah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
[Selengkapnya](#)
- INSPEKTORAT**
merupakan unit kerja yang berada di bawah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
[Selengkapnya](#)

Aplikasi Lainnya

2352-9000 KIRIM SURAT TANYA JAWAB WHISTLEBLOWING HUBUNGI MK MEDIA SOSIAL PENGUNJUNG

Peradilan

Before

The screenshot shows the old website interface for the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. It features a traditional layout with a top navigation bar, a main header with the institution's name and logo, and a sidebar on the left containing a list of menu items. The main content area includes a large image of the building and a grid of icons representing various functions like 'Sejarah dan Perkembangan', 'Visi dan Misi', 'Kedudukan dan Kewenangan', and 'Struktur Organisasi'. The design is somewhat cluttered and lacks modern interactive elements.

After

The screenshot shows the new website interface for the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. It features a modern, clean design with a dark header and a prominent red navigation bar. The main content area is more organized, with a clear focus on the 'Peradilan' section. It includes a large image of the building, a grid of icons, and a prominent blue button for 'KODE ETIK (SAPTA KARSA HUTAMA)'. The design is more user-friendly and visually appealing.

Peradilan - Struktur Organisasi

Before

The 'Before' screenshot shows a website layout where the 'PERADILAN' (Judiciary) section is active. The main content area displays the 'STRUKTUR ORGANISASI' (Organizational Structure) section, which includes a detailed organizational chart and a list of judges. The layout is somewhat cluttered with multiple columns and a large sidebar on the left.

After

The 'After' screenshot shows a redesigned website layout. The 'PERADILAN' section is still active, but the main content area is now dominated by a large, clean hero section titled 'Struktur Organisasi'. The layout is more modern and user-friendly, with a clear focus on the organizational structure. The sidebar and navigation elements are simplified and integrated into the overall design.

Before

The screenshot shows the official website of the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. The header includes the date 'Jumat, 08 Maret 2024', a search bar, and the logo of the institution. The main navigation menu lists: BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and UNITY KERJA. The 'PERADILAN' section is active, listing various judges and their periods. The main content area features a large image of the building and a section titled 'STRUKTUR ORGANISASI'. This section includes a text block stating: 'Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Sebagai Berikut:'. Below the text is a detailed organizational chart showing the hierarchy from the Ketua Mahkamah Konstitusi down to various departments like Biro Perencanaan, Biro Hukum, and Biro Humas. A legend at the bottom of the chart explains the symbols used: a solid line for 'Garis Komando', a dashed line for 'Garis Koordinasi', and a dotted line for 'Garis Pengawas'. At the bottom of the page, there is a contact information section with the phone number 2352-9000 and social media icons.

After

This section displays a simplified organizational structure diagram at the top, showing the relationship between 'PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN', 'KUMUNIKASI', and 'PUSAT PENDIDIKAN PANCIASILA DAN KONSTITUSI'. Below this is a legend for the organizational chart symbols: a solid line for 'Garis Komando', a dashed line for 'Garis Koordinasi', and a dotted line for 'Garis Pengawas'. The main part of the section is a grid of portraits of the members of the Mahkamah Konstitusi. The top row features four members: Dr. Suhartoyo S.H., M.H.; Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.; Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.; and Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.. Below each portrait is their name and title. The bottom row shows four smaller portraits of other members. The text 'Masa Jabatan' and 'Masa Jabatan' are also present, indicating the terms of office for some members.

Peradilan - Profil MKMK

Before

The screenshot shows the old website layout. At the top, there is a header with the date 'Jumat, 08 Maret 2024' and the logo of the Constitutional Court. Below the header is a navigation bar with categories: BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and UNIT KERJA. The main content area is divided into several sections: PERADILAN (with sub-sections like SEBARAH DAN PERKEMBANGAN, VISI DAN MISI, etc.), DEWAN ETIK, MAJELIS KEHORMATAN MK, and KODE ETIK (SAPTA KARSAS HUTAMA). A large image of a courtroom is featured, and below it is a profile section for Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., including his photo, name, and a detailed biography.

After

The screenshot shows the new website layout. At the top, there is a header with the date 'Jumat, 08 Maret 2024' and the logo of the Constitutional Court. Below the header is a navigation bar with categories: BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and PUBLIKASI. The main content area is divided into several sections: PERADILAN, DEWAN ETIK, and MAJELIS KEHORMATAN MK. A large image of a courtroom is featured, and below it is a profile section for Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., including his photo, name, and a detailed biography.

Peradilan - Jadwal Sidang MKMK

Before

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PERADILAN

- SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
- VISI DAN MISI
- KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
- STRUKTUR ORGANISASI
- TUGAS FOKUS DAN FUNGSI
- SUMBER DAN JANJI HAKIM
- EMBLEM, HYMNE DAN MAJELIS
- LOGO

DEWAN ETIK

- PROFIL DEWAN ETIK
- PERATURAN DEWAN ETIK
- KEPUTUSAN DEWAN ETIK

MAJELIS KEHORMATAN MK

- PELAOBAN ONLINE
- PROFIL MKMK
- PERATURAN MKMK
- PELAOBAN MKMK
- JADWAL SIDANG MKMK
- RISALAH SIDANG MKMK
- KEPUTUSAN MKMK

KODE ETIK (SAPTA KARSIA HUTAMA)

JADWAL SIDANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

No	Tanggal Sidang	No Registrasi	Judul Pelaporan	Pihak	Keterangan
1	07 November 2023 16.00 s.d Selesai	21/MKMK/LIARLTP/X/2023	LAPORAN PELANGGARAN ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI	Pelapor 1. Charles Sismorang 2. Tengku Rully Fachriyah 3. Teddy Lesmana 4. James Siagian 5. Anggot Gaber Marul Tua Siringa 6. Jamal Riko Frans Tampubolon 7. Sant Manak 8. Ron Panghutan Ngalin 9. Putra Ari Anggara Sihang 10. Ronva Makmur Panggabean Acara Sidang PENGUCAPAN PUTUSAN MKMK Tempat Ruang Sidang Pleno MK Lantai 2 Gd. 1	Kuasa 1. Peraturan Adhukab Demokrasi Indonesia
2	07 November 2023 16.00 s.d Selesai	29/MKMK/LIARLTP/X/2023	LAPORAN PELANGGARAN ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI	Pelapor 1. Alamsyah Hanafiah Kuasa 1. Alamsyah Hanafiah A	Acara Sidang PENGUCAPAN PUTUSAN MKMK Tempat Ruang Sidang Pleno MKMK

After

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM PUBLIKASI

English Menu Internal

Jadwal Sidang MKMK

Peradilan Dewan Etik Majelis Kehormatan MK

Profil MKMK Jadwal Sidang MKMK Peraturan MKMK
Risalah Sidang MKMK Pelaporan MKMK Keputusan MKMK

BERANDA / MAJELIS KEHORMATAN MK / JADWAL SIDANG MKMK

Jadwal Sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Profil Dewan Etik Peraturan MKMK Pelaporan MKMK Jadwal Sidang MKMK Risalah Sidang MKMK Keputusan MKMK

Cari...

NO.	TANGGAL SIDANG	NOMOR REGISTRASI	JUDUL PELAPORAN	PIHAK
1	07 November 2023, 16:11 WIB	6/MKMK/LIARLTP/X/2023	LAPORAN PELANGGARAN ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI	Pelapor 1. Andi, S.H Kuasa 1. LBH CIPTA KAI
2	07 November 2023, 16:11 WIB	3/MKMK/LIARLTP/X/2023	LAPORAN PELANGGARAN ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI	Pelapor 1. Dega Kautsar F Kuasa

Hakim

Before

April 08 Maret 2024 English

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN **HAKIM** PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

HAKIM

- HAKIM KONSTITUSI
- SUHARTOYO (KETUA)
- SALDI ISRA (WAKIL)
- ANWAR USMAN
- ARIEF HIDAYAT
- ENNY NURBANINGSIH
- DANIEL YUSMID PRACASTAHO FODIH
- M. GUNTUR HAMZAH
- RIDWAN MANDYUR
- ARISU SANI

HAKIM PERIODE SEBELUMNYA

- KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
- WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
- HAKIM KONSTITUSI

HAKIM KONSTITUSI

No.	Foto	Nama	Masa Jabatan	Lembaga Pengusul
1		Dr. Suhartoyo S.H., M.H. Ketua Mahkamah Konstitusi (09 November 2023 s/d 09 November 2028)	Periode 1: 07 Januari 2020 s/d 07 Januari 2020 Periode 2: 07 Januari 2020 s/d 13 November 2029	Mahkamah Agung Mahkamah Agung
2		Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	11 April 2017 s/d 11 April 2022	Presiden
3		Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Periode 1: 06 April 2011 s/d 06 April 2016 Periode 2: 07 April 2016 s/d 07 April 2026	Mahkamah Agung Mahkamah Agung
4		Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.	Periode 1: 01 April 2013 s/d 01 April 2018 Periode 2: 27 Maret 2018 s/d 03 Februari 2026	Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat

After

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia English Menu Internal

BERANDA PERADILAN **HAKIM** PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM PUBLIKASI

Hakim Konstitusi

HAKIM

Hakim Konstitusi Hakim Periode Sebelumnya

BERANDA / HAKIM / HAKIM KONSTITUSI

Hakim Konstitusi

Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

Jabatan :
Hakim Konstitusi

Masa Jabatan :
Periode 1 : 01 Januari 2020 s/d 01 Januari 2029
Periode 2 : 01 Januari 2023 s/d 01 Januari 2028
Periode 3 : 01 Januari 2015 s/d 01 Januari 2020

Lembaga Pengusul :
Periode 1 : Mahkamah Agung
Periode 2 : Mahkamah Agung
Periode 3 : Mahkamah Agung

Profil :
[Klik Disini](#)

Perkara

Before

LEMBAHA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PERKARA

PROSEDUR PERMOHONAN PERMOHONAN ONLINE TAHAPAN PERKARA

- PENGJAJAN PERMOHONAN
- PEMERIKSAAN KELENGKAPAN
- PERUBAHAN PERMOHONAN
- REGISTRASI
- PENYAMPILAN SALINAN PERMOHONAN DAN PEMBERTAHAN SIDANG PERTAMA
- PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
- PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
- SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN
- PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN

PERSIDANGAN

- JADWAL SIDANG
- RISALAH
- ANDALSI

REKAPITULASI PERKARA

- REKAPITULASI PERKARA PLU
- REKAPITULASI PERKARA SKN
- REKAPITULASI PERKARA PHPKADA
- REKAPITULASI PERKARA PHPU

Rekapitulasi Putusan

No	Jenis	Jumlah	Persentase
1	PLU	1781	49.17%
2	SKN	29	0.80%
3	PHPU	676	18.66%
4	PHPKADA	1136	31.36%
Total		3622	100%

TAHAPAN PERKARA

START

Pengajuan Permohonan

Pemeriksaan Kelengkapan

Perbaikan Permohonan

Registrasi

Penyampilan Salinan Permohonan dan

Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan Persidangan

Perkara Online

Permohonan Online smpel.mki.id

After

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM PUBLIKASI

Perkara

TAHAPAN KERJA PERSIDANGAN REKAPITULASI PERKARA

Perkara

Pengajuan Permohonan

Perkara Registrasi

BERANDA / TAHAPAN KERJA

Prosedur Permohonan

Klik prosedur permohonan untuk mengetahui langkah-langkah pendaftaran permohonan secara langsung dan secara online

Permohonan Online

Klik permohonan online untuk melakukan permohonan melalui website <https://smpel.mki.id/> Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

10 UNDANG-UNDANG YANG SERING DIUJI

NO	NAMA UNDANG-UNDANG	JUMLAH
1	Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	137
2	Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	83
3	Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	48
4	Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	39

Perkara - Jadwal Sidang

Before

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PERKARA

PROSEDUR PEMOHONAN
PEMOHONAN ONLINE
TAHAPAN PERKARA

- PENGALUAN PEMOHONAN
- PEMERIKSAAN KELENGKAPAN
- PERSIAPAN PEMOHONAN
- REGISTRASI
- PENYAMPAIAN SALINAN PEMOHONAN DAN PEMBERTAHAN SIDANG PERTAMA
- PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
- PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
- SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN
- PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN

PERSIDANGAN

- JADWAL SIDANG
- RISALAH
- ANDRASI

REKAPITULASI PERKARA

- REKAPITULASI PERKARA PLU
- REKAPITULASI PERKARA SKN
- REKAPITULASI PERKARA PHPKADA
- REKAPITULASI PERKARA PHPU

Rekapitulasi Putusan

No	Perkara	Jumlah	Persentase
1	PLU	1781	49.17%
2	SKN	29	0.80%
3	PHPU	676	18.66%
4	PHPKADA	1136	31.36%
Total		3622	100%

JADWAL SIDANG

Tanggal	Perkara	Pemohon	Kuasa	Acara	Keterangan
Rabu 13 Maret 2024, 10:30 WIB	135/PUU-X00/2023 Penggajian Materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Dr. Teguh Satya Braks, S.H., M.H.	Viktor Santoso Tindasa Harato Setyadi Rajah, S.H. Nur Rizqi Khaffan Rutina Haryati, S.H.	Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli Pemohon dan Ahli/Saksi Presiden (V)	Tempat: Gd. M081 Lantai 2 Tracking Perkara: Tracking
Rabu 13 Maret 2024, 13:00 WIB	36/PUU-X00/2024 Penggajian Materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Moh. Quiyati	Dedy Ridadi Arain Sommo	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Tempat: Gd. M081 Lantai 2 Tracking Perkara: Tracking
Rabu 13 Maret 2024, 14:00 WIB	30/PUU-X00/2024 Penggajian Materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketenagakerjaan dan Tiga Cara Persajakan	Puguh Suwano	Aif Suherly Mayono, S.H.	Pembacaan Pemohonan (I)	Tempat: Gd. M081 Lantai 4 Tracking Perkara: Tracking

After

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM PUBLIKASI

Jadwal Sidang

TAHAPAN KERJA PERSIDANGAN REKAPITULASI PERKARA

Jadwal Sidang

Putusan: [Iktisar](#)
Risalah: [Anotasi](#)

BERANDA / PERSIDANGAN

Prosedur Pemohonan
Klik prosedur permohonan untuk mengetahui langkah-langkah pendaftaran permohonan secara langsung dan secara online

Pemohonan Online
Klik permohonan online untuk melakukan permohonan melalui website <https://sampil.mkri.id/> Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

Jadwal Sidang

Cari jadwal sidang...

PRINT COPY CSV

TANGGAL	PERKARA	PEMOHON	KUASA	ACARA	KETERANGAN
Selasa, 19 Maret 2024, 14:00 WIB	40/PUU-XXII/2024 Perlindungan terhadap Hak Dasar Anak untuk Memperoleh Gizi Sehat	Indonesia Food Security Review, dll.		Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Tempat: - Tempat:

Perkara - Rekapitulasi PHPU

Before

The old website layout is cluttered with multiple navigation menus. The main content area features a table titled "REKAPITULASI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM" with the following data:

Tahun	Dalam Proses yang lalu	Diregistrasi	Jumlah	Amat Putusan	Jumlah Putusan	Dalam Proses Tahun Ini	Keterangan
2004	0	44	44	Kabul : 15 Tolak : 13 Tidak Diterima : 16 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	44	0	
2009	0	70	70	Kabul : 24 Tolak : 37 Tidak Diterima : 8 Tarik Kembali : 1 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	70	0	
2014	0	297	297	Kabul : 1 Tolak : 291 Tidak Diterima : 2 Tarik Kembali : 2 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	296	1	
2019	1	261	262	Kabul : 13 Tolak : 82 Tidak Diterima : 122 Tarik Kembali : 10 Gugur : 34 Tidak Berwenang : 0	261	1	
2024	1	0	1	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 0 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	0	1	
				Kabul : 53 Tolak : 423			

Below the table is a "Rekapitulasi Putusan" table:

No	Perkara	Jumlah	Persentase
1	PUU	1781	49,17%
2	SKLN	29	0,80%
3	PHPU	676	18,66%
4	PHPKADA	1196	31,36%
Total		3622	100%

After

The new website layout is clean and modern. The main content area features a prominent "Rekapitulasi Perkara" header and a clear table of case statistics:

TAHUN	DALAM PROSES YANG LALU	DIREGISTRASI	JUMLAH	AMAR PUTUSAN	JUMLAH PUTUSAN	DALAM PROSES TAHUN INI	KETERANGAN
2004	0	44	44	Kabul : 15 Tolak : 13 Tidak diterima : 16 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	44	0	
2009	0	70	70	Kabul : 24 Tolak : 37 Tidak diterima : 8 Tarik Kembali : 1	70	0	

Administrasi Umum - Informasi Anggaran

Before

The old website interface features a top navigation bar with a menu: BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and UNIT KERJA. A sidebar on the left lists various administrative categories. The main content area includes a header with the court's name and logo, followed by a 'GRAFIK INFORMASI ANGGARAN' section. This section contains two bar charts: 'Penyerapan Anggaran' (Annual Budget Absorption) and 'Penyerapan Anggaran Per-Biro' (Monthly Budget Absorption). The annual chart shows a steady increase from 9.82% in January to 98.74% in December. The monthly chart shows high absorption rates, starting at 98.56% in January and ending at 98.31% in December.

Bulan	Persentase
Januari	9.82%
Februari	15.23%
Maret	21.65%
April	28.39%
Mei	34.71%
Juni	42.89%
Juli	50.09%
Agustus	54.39%
September	63.56%
Oktober	72.03%
November	85.17%
Desember	98.74%

Bulan	Persentase
Januari	98.56%
Februari	98.36%
Maret	98.82%
April	99.43%
Mei	99.21%
Juni	99%
Juli	99.8%
Agustus	99.56%
September	99.31%
Oktober	99.31%
November	98.31%
Desember	98.31%

After

The new website interface has a more modern design with a dark header and a prominent 'Informasi Anggaran' title. The navigation menu is simplified to: BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and PUBLIKASI. A secondary menu highlights 'AKUNTABILITAS PUBLIK', 'KEPEGAWAIAN', 'KEHUMASAN', 'SIARAN PERS', and 'INFO PUBLIK'. The main content area features a grid of links to various reports: Rencana Strategis, Laporan Keuangan, Pelayanan Publik, Informasi Anggaran, Daftar Inventaris Barang, PPD, and Daftar PNBP. Below this is a 'GRAFIK Informasi Anggaran' section with a 'Penyerapan Anggaran' bar chart for the year 2020, showing a steady increase from approximately 10% in January to 100% in December.

Bulan	Persentase (%)
Januari	~10
Februari	~15
Maret	~20
April	~25
Mei	~30
Juni	~35
Juli	~40
Agustus	~45
September	~50
Oktober	~55
November	~60
Desember	100

Administrasi Umum - LHKPN

Before

Minggu, 10 Maret 2024

English

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

ADMINISTRASI UMUM

- AKUNTABILITAS PUBLIK
- RENCANA STRATEGIS
- INFORMASI ANGGARAN
- LAKP
- LAPORAN KEUANGAN
- DAFTAR INVENTARIS BARANG
- DAFTAR PNBP
- PELAWANAN PUBLIK
- PIPD
- KEPEGAWAIAN
- LHKPN
- STATISTIK PEGAWAI
- TATA PEGAWAI
- RESEARCH
- HASIL PENELITIAN
- KEHUMASAN
- KERJASAMA
- SIPRM MK
- LINK
- REFORMASI BIROKRASI
- EMBLEM, HIMNE DAN MARS
- INFORMASI
- INFORMASI LELANG
- PENGUMUMAN
- LPSE MAHKAMAH KONSTITUSI RI

BERANDA > INFORMASI ADMINISTRASI > STATISTIK LHKPN MAHKAMAH KONSTITUSI

Daftar LHKPN Rincian LHKPN

e-lhkpn e-Announcement

e-lhkpn Laporan LHKPN

Tabel LHKPN 2022

No	Unit Kerja	Jumlah Wajib Laporan	Jumlah yang Telah Melaporkan Kekayaan	%
1	Hakim Konstitusi	9	7	78%
2	Pegawai Penyelenggara Negara Wajib LHKPN	46	45	98%
3	Pegawai/ASN	223	220	99%

Tabel LHKPN 2021

No	Unit Kerja	Jumlah Wajib Laporan	Jumlah yang Telah Melaporkan Kekayaan	%
1	Hakim Konstitusi	9	7	78%
2	Pegawai Penyelenggara Negara Wajib LHKPN	46	46	100%
3	Pegawai/ASN	223	221	99%

After

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

English Menu Internal

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM PUBLIKASI

LHKPN

AKUNTABILITAS PUBLIK KEPEGAWAIAN KEHUMASAN SIARAN PERS INFO PUBLIK

LHKPN Data Pegawai Statistik Pegawai

BERANDA / KEPEGAWAIAN

LHKPN

e-Announcement Laporan LHKPN

Tabel LHKPN 2022

NO	UNIT KERJA	JUMLAH WAJIB LAPOR	JUMLAH YANG TELAH MELAPORKAN KEKAYAAN	%
1	Hakim Konstitusi	9	7	78%
2	Pegawai Penyelenggara Negara Wajib LHKPN	46	45	98%
3	Pegawai/ASN	223	220	99%

Statistik

Administrasi Umum - Statistik Pegawai

Before

The screenshot shows the old website interface. At the top, it says 'Minggu, 10 Maret 2024' and 'English'. The main header includes the logo of the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia and the text 'LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI'. Below this is a navigation bar with categories like BERANDA, PERADILAN, HAKIM, PERKARA, PERATURAN, ADMINISTRASI UMUM, and UNIT KERJA. A sidebar on the left lists various administrative functions. The main content area features a large image of documents and a pie chart titled 'Grafik Pegawai di Mahkamah Konstitusi'. The chart shows the following data:

Kategori	Jumlah
Pegawai Kontrak	283
Pegawai PNS	286
Pegawai Polri	51
Pegawai PPPK	18
Pegawai PPNPN	84

After

The screenshot shows the new website interface. It features a clean, modern design with a dark header and a red navigation bar. The main content area is titled 'Statistik Pegawai' and includes a sub-header 'Statistik Seluruh Pegawai Mahkamah Konstitusi Per Maret 2024'. A donut chart displays the same data as the old interface, with a legend on the right:

Kategori	Jumlah
Pegawai Polri	51
Pegawai PNS	286
Pegawai Kontrak	283
Pegawai PPPK	18
Pegawai PPNPN	84

Administrasi Umum - Kerjasama

Before

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

ADMINISTRASI UMUM

AKUNTABILITAS PUBLIK

- RENCANA STRATEGIS
- INFORMASI ANGGARAN
- LAKP
- LAPORAN KEUANGAN
- DAFTAR INVENTARIS BARANG
- DAFTAR PNBP
- PELAYANAN PUBLIK
- PIPD

KEPEGAWAIAN

- LINK
- STATISTIK PEGAWAI

DATA/CGHAIN

PENELITIAN

- HASIL PENELITIAN

KEHUMASAN

- KERJASAMA
- SIPRAME
- LINK
- REFORMASI BIKERSI
- EMBLEM, HYMNE DAN MARS

INFORMASI

- INFORMASI LELANG
- PENJUALAN
- IPSI MAHKAMAH KONSTITUSI RI

BERANDA > INFORMASI ADMINISTRASI > KERJASAMA

KERJASAMA

Nota Kesepahaman: 279 Tanda Tangan Digital: 36 Tanda Tangan Basah: 243

No.	Modul	Tentang	Tanggal	Di Unduh
1	Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Universitas Ahmad Dahlan	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum	Jum'at, 15 Desember 2023	Di Unduh : 49
2	NOTA KESEPAHAMAMAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS WIDYADARMA MALANG	PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI HUKUM	Kamis, 14 Desember 2023	Di Unduh : 124
3	NOTA KESEPAHAMAMAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI HUKUM	Kamis, 14 Desember 2023	Di Unduh : 120
4	NOTA KESEPAHAMAMAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS WIDYADARMA MALANG	PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI HUKUM	Senin, 27 November 2023	Di Unduh : 376
5	NOTA KESEPAHAMAMAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS SIKRANTJARA MARESKAL SURYADARMA (SUNDRYA)	PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI HUKUM	Senin, 16 Oktober 2023	Di Unduh : 203
-	Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi Dan Kementerian	Penguatan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pengendalian Kebijakan Kementerian Dan Lembaga Melalui	Selasa,	Di ...

After

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM PUBLIKASI

AKUNTABILITAS PUBLIK KEPEGAWAJAN **KEHUMASAN** SIARAN PERS INFO PUBLIK

Kerjasama LINK

BERANDA / KEHUMASAN

Kerjasama

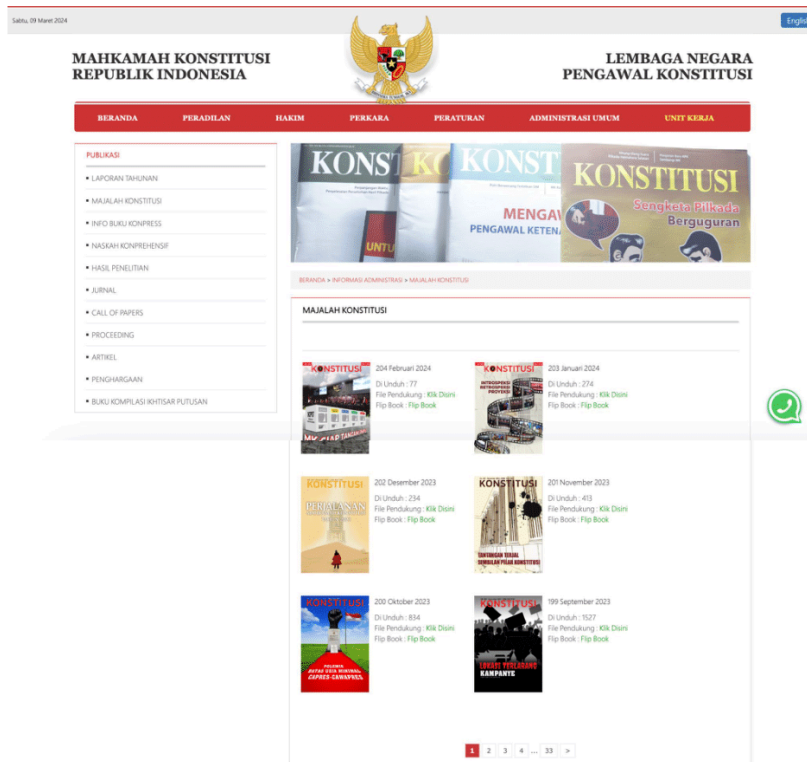
Nota Kesepahaman 279 Tanda Tangan Digital 36 Tanda Tangan Basah 243

Cari kerjasama...

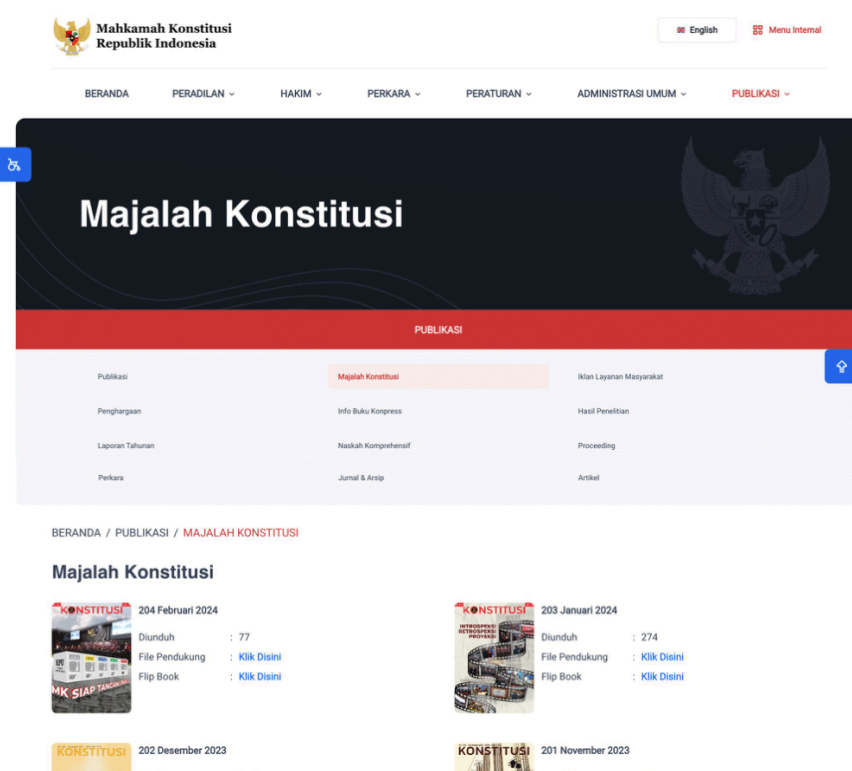
NO	JUDUL	TENTANG	TANGGAL	DI UNDUH
136/PK/2023	Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Universitas Ahmad Dahlan	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum	Jumat, 15 Desember 2023	49
135/PK/2023 & 0331/C.6-VIII/XII/2023	NOTA KESEPAHAMAMAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI HUKUM	Kamis, 14 Desember 2023	120

Publikasi - Majalah Konstitusi

Before



After



Pilkada Serentak

Before

Home | Daftar Pemohonan | Peraturan | Info Wilayah | Form Dan Akta | Alur Perkara | Tahapan | Jadwal Sidang | Jadwal Sidang Sebelumnya | Streaming

Mahkamah Konstitusi RI

Daftar Pemohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2020

PERMOHONAN

Gubernur	Bupati	Walikota	Total
OL: 19 OFF: 4	OL: 74 OFF: 16	OL: 10 OFF: 2	OL: 49 OFF: 18

PERKARA

Gubernur	Bupati	Walikota	Total
OL: 19 OFF: 4	OL: 74 OFF: 16	OL: 10 OFF: 2	OL: 49 OFF: 18

Perkara Gubernur

Show: 10 entries

TANGGAL	PERMOHONAN/PERKARA	PARA PIHAK	FILE	PUTUSAN
Rabu, 25 Agustus 2021 10:44:40 WIB (Online)	PHP Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 APPP Nomor : 155/PAN.LMK Registrasi Ni : 151/PHP.PGU	Pemohon: • Khairil Anwar Kuasa Pemohon: -	<ul style="list-style-type: none"> Pemohonan Pemohonan di Registrasi Perbaikan Pemohonan Jawaban Pemohonan Keterangan Bawaslu 	
Senin, 21 Juni 2021 14:14:52 WIB (Online)	PHP Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 APPP Nomor : 150/PAN.MKAP/3/06/2021 Registrasi Nomor : 146/PHP.GUB-XXX/2021	Pemohon: • Prof H Denny Indragana, S.H., LL.M., Ph.D. • Drs H DIFRIADI Kuasa Pemohon: • Dr. Bambang Widodo, S.H. • T.M. Luthi Yazid, S.H., LL.M., CLU, CIL • Dr. Hanu Widodo, S.H., M.Hum • Tareq Muhammad Aziz Elyen, S.H. • Iskandar Sonhadji, S.H. • Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. • Daniel Alim, S.H., M.Kn. • Febril Dianayah, S.H. • Donald Fariz, S.H., M.H. • Henjanto, S.H., M.H. • Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M. • Zamrony, S.H., M.Kn., CKA • Harimuddin, S.H. • Muhammad Rizki	<ul style="list-style-type: none"> Pemohonan Pemohonan di Registrasi Pemohonan Pihak Terkait Jawaban Pemohonan Keterangan Bawaslu Keterangan Pihak Terkait 	

After

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM PUBLIKASI

Pengujian UUD & SKLN, Pilkada Serentak & PPHU Pilpres

PENGUJIAN UUD & SKLN PILKADA SERENTAK PPHU & PILPRES

Daftar Pemohonan Peraturan Info Wilayah
Form dan Akta Alur Perkara Tahapan
Jadwal Sidang Streaming

BERANDA / PILKADA SERENTAK / DAFTAR PERMOHONAN

Nomor APPP / Registrasi 2020

Daftar Pemohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2020

Pemohonan

Gubernur	Bupati	Walikota	Total
OL : 97 OFF : 33	OL : 68 OFF : 31	OL : 70 OFF : 13	OL : 100 OFF : 62
OFF : 93	OFF : 0	OFF : 13	OFF : 5

Perkara

Gubernur	Bupati	Walikota	Total
: 48	: 6	: 100	: 69

Dokumentasi Teknis

Framework & Libraries

Berikut adalah beberapa *framework & libraries* utama yang digunakan dalam proyek ini.

	Nama	Versi	Tautan Dokumentasi Resmi	Deskripsi
Framework	Next.js	14.0.3	https://nextjs.org/docs	
UI Libraries	Chakra UI	2.8.2	https://chakra-ui.com/	
Utility Tools	Chart JS	4.4.1	https://www.chartjs.org/	Menampilkan chart
	D3 Org Chart	3.1.1	https://github.com/bumbeishvili/org-chart	Bagan Struktur Organisasi
	Day JS	1.11.10	https://day.js.org/	Format tanggal
	React Hook Form	7.49.2	https://react-hook-form.com/	Validasi formulir
	Sanitize HTML	2.11.0	https://github.com/apostrophecms/sanitize-html	Membersihkan html untuk ditampilkan dari respon api, menghindari serangan XSS
	swiper	11.0.5	https://swiperjs.com/	Sliding images
	ofetch	1.3.3	https://github.com/unjs/ofetch	API Requests

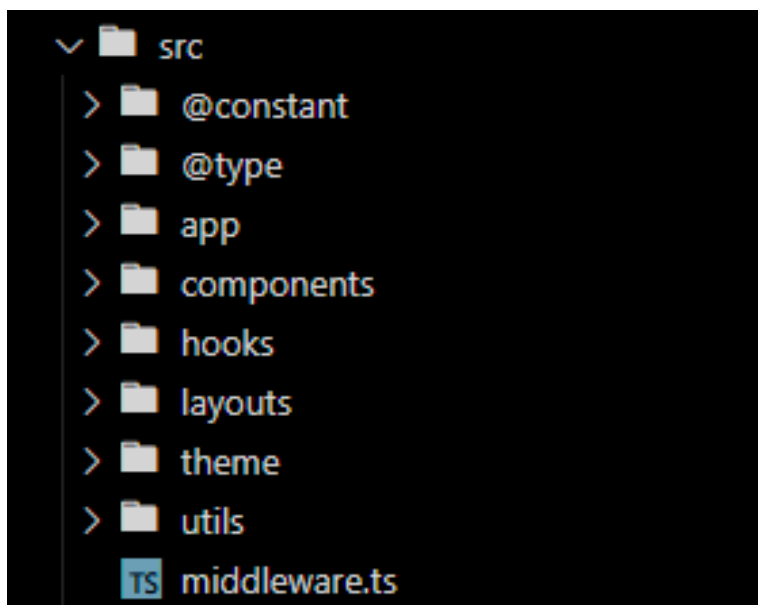
Struktur Kode

Pengaturan Dasar

Dalam mengatur kode agar sesuai dengan standard, kami menerapkan beberapa pengaturan seperti dibawah ini:

Nama	Path	Tujuan
Eslint Config	.eslintrc.json	Validasi konvensi kode agar seluruh kode mengikuti peraturan dan standar
Typescript Config	tsconfig.json	Pengaturan Typescript
Next Config	next.config.js	Pengaturan Next JS
Prettier Config	.prettierrc.json	Pengaturan indent dan baris baru
Package JSON	package.json	Daftar semua <i>framework & libraries</i> pendukung

Struktur Folder Utama (folder src)

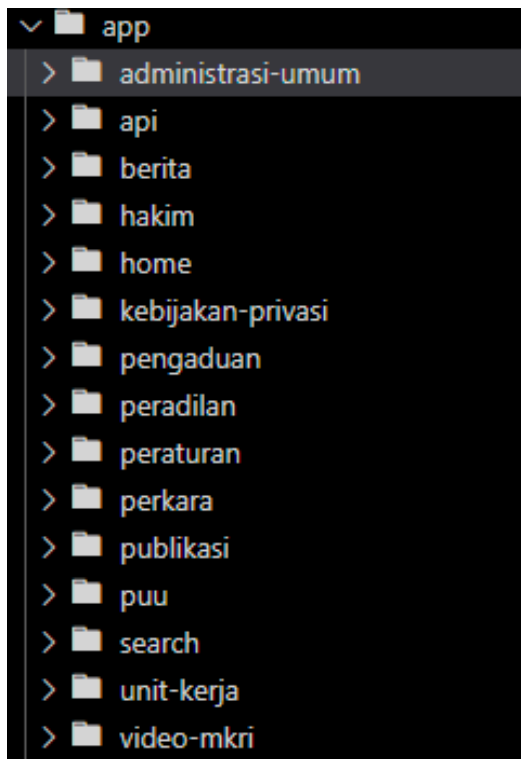


Nama Folder	Deskripsi
@constant	Semua konstanta, yaitu variabel yang tidak dapat diubah
@type	Seluruh deklarasi tipe dan antarmuka
app	Folder utama Next JS routing. Lebih lengkap mengenai app folder, dapat melihat dokumentasi disini https://nextjs.org/docs/app
components	Komponen yang dapat digunakan kembali secara global, tidak terikat dengan konteks bisnis tertentu.
hooks	Hooks global, tidak terikat dengan konteks bisnis tertentu.
layouts	Komponen dasar dari keseluruhan layout yang ada di website, terdiri dari Navbar, Main Content, Footer.
theme	Kustomisasi tema Chakra UI
utils	<i>Utility function.</i>
middleware.ts	Next JS HTTP Middleware, lihat dokumentasi lebih lengkap: https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/routing/middleware

Folder App

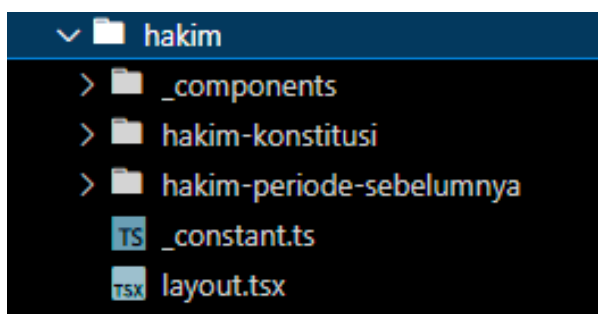
Berdasar pada konvensi daripada framework NextJS, semua yang ada didalam folder app akan menjadi url level 1, sebagai contoh:

- `{base_url}/administrasi-umum`
- `{base_url}/berita`
- `{base_url}/hakim, etc`



Kemudian, semua folder yang berada di dalam subfolder level 1 akan menjadi url level 2 dan seterusnya, sebagai contoh:

- `{base_url}/hakim/hakim-konstitusi`
- `{base_url}/hakim/hakim-periode-sebelumnya`



Menyajikan Tampilan

Jika dalam app folder tersebut memiliki file `page.tsx`, NextJs akan menyajikan tampilan sebuah laman, sebagai contoh untuk `{base_url}/unit-kerja`:



Folder unit kerja tersebut akan menyajikan tampilan karena memiliki file `page.tsx`. Jika tidak ada file `page.tsx` saat kita mengunjungi url `{base_url}/unit-kerja` di browser maka akan memunculkan laman 404 not found.

Dalam proyek ini, folder `Screen` digunakan untuk menempatkan view yang akan dirender oleh `page.tsx`. Sehingga jika di dalamnya terdapat `page.tsx`, maka folder `Screen` pun harus ada.

Dokumentasi lebih lengkap dapat dilihat melalui link ini:

<https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/routing/pages-and-layouts>

File Layout

Jika di dalam subfolder terdapat file `layout.tsx`, pastikan bahwa seluruh subfolder atau url path selanjutnya akan menggunakan struktur layout antar muka yang sama, lebih jelasnya silahkan lihat <https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/routing/pages-and-layouts>

Konvensi Kode

Untuk konvensi kode kami menggunakan *tools* seperti `eslint`, `prettier` dan `tsconfig`. Pengaturan dapat dilihat dalam file `.eslintrc.json`, `.prettierrc.json` and `tsconfig.json`. *Tools* tersebut akan berjalan saat kita melakukan `commit` dan `push` ke repository. Selain itu, saat kita sedang melakukan koding, mereka akan memberitahu kita tentang kesalahan dan akan mengeluarkan error.

Proyek ini juga mempunyai standar untuk *commit message*, dimana untuk *commit* diharapkan seluruh pengembang mengikuti standar yang sesuai agar nantinya memudahkan pengembang lain untuk melihat *git commit history*, silahkan lihat ke `.husky/commit-msg` untuk pengaturan konvensinya.

Hasil Pengujian

Menu	Judul	Case	QA
Beranda	Banner	Banner tampil dengan kondisi: 1. Jumlah banner sesuai dengan response dari API 2. Judul, subjudul dan tombol (jika ada) akan tampil 3. Jika tombol di klik akan mengarahkan ke halaman yang dituju	PASS
	Search	1. Pencarian perkara mengarah pada tracking.mkri.id 2. Pencarian website mengarah pada halaman Search Result	PASS
	Tab Perkara	Tab putusan, risalah, ikhtisar dan anotasi tampil	PASS
	Putusan	Tab putusan tampil dengan kondisi: 1. menampilkan 5 item putusan terakhir 2. Tombol selengkapnya yang akan mengarah pada menu Perkara -> Putusan	PASS
	Risalah	Tab risalah tampil dengan kondisi: 1. Menampilkan 5 item risalah terakhir 2. Setiap item risalah memiliki file pdf dan juga file audio yang dapat di putar 3. Tombol selengkapnya yang akan mengarah pada halaman Perkara -> Ikhtisar	PASS
	Ikhtisar	Ikhtisar	PASS
	Anotasi	Tab anotasi tampil dengan kondisi: 1. Menampilkan 5 item anotasi terakhir 3. Tombol selengkapnya yang akan mengarah pada halaman Perkara -> Anotasi	PASS
	Kalendar Jadwal Sidang	Kalendar jadwal sidang tampil dengan kondisi: 1. Menampilkan bulan berjalan 2. Memberikan tanda pada hari ini dan hari libur 3. Memberikan tanda pada sidang, putusan, tunda dan keduanya 4. Terdapat tombol untuk mengganti bulan 5. Pada tanggal yang terdapat kegiatan jika di klik mengarah pada halaman Jadwal Sidang dengan filter tanggal terpilih 6. Pada hari libur jika di klik menampilkan Jadwal Hari Libur 7. Terdapat tombolnya Selengkapnya yang akan mengarah pada halaman Jadwal Sidang	PASS
Menu Permohonan Online	Tampil menu permohonan online yang mengarah pada simpler.mkri.id	PASS	

	Menu Pengujian UUD & SKLN	Jika di klik mengarah pada halaman Pengujian UUD & SKLN > Peraturan dengan filter tahun terpilih	PASS
	Menu Pilkada Serentak	Jika di klik mengarah pada halaman Pilkada Serentak > Daftar Pemohon dengan filter tahun terpilih	PASS
	Menu PPHU & Pilpres	Jika di klik mengarah pada halaman PPHU Pilpres > Daftar Pemohon dengan filter tahun terpilih	PASS
	Pengumuman	Menampilkan pengumuman dengan kondisi: 1. Tanggal pengumuman dan statistik dilihat 2. Icon menyesuaikan tipe pengumuman (PDF, IMAGE) 3. Jika di klik mengarah ke halaman yang dituju 4. Terdapat tombol selengkapnya yang mengarah pada halaman Administrasi Umum > Info Publik > Pengumuman	PASS
	Video MKRI	Menampilkan video mkri dengan kondisi: 1. 4 Video dengan 1 video besar 2. Dapat di play secara langsung 3. Tombol selengkapnya yang mengarah pada halaman Video MKRI 4. Terdapat label LIVE atau Siaran Ulang	PASS
	Berita MKRI	Menampilkan berita mkri dengan kondisi: 1. Terdapat 4 tab (berita populer, berita sidang, berita non sidang, berita 2 menit) 2. Berita tampil sesuai tab yang dipilih 3. Terdapat tombol selengkapnya dan tombol slide kiri dan kanan	PASS
	Aplikasi Lainnya	Menampilkan aplikasi aplikasi external yang dapat di klik dan akan mengarah ke halaman aplikasi tersebut	PASS
	Layanan Pengaduan dan Informasi	Menampilkan tombol Pusat Pengaduan yang mengarah ke halaman Pengaduan	PASS
	Hubungi MK	Menampilkan tombol Hubungi MK yang akan mengarah ke contactmk.mkri.id	PASS
	English	Menampilkan tombol yang akan mengarah ke en.mkri.id	PASS
	Tombol Internal	Menampilkan tombol yang akan mengarah ke website internal mkri.id	PASS
Footer	Footer	Menampilkan footer sesuai dengan desain dan juga menu yang bisa di klik mengarah pada halaman masing-masing	PASS
Video MKRI	Live Streaming	- Menampilkan video streaming sesuai dengan ruang sidang - Menampilkan 4 video siaran ulang - Menampilkan lokasi video conference dalam bentuk peta dan table	PASS

		- Terdapat tombol menuju ke youtube channel MKRI	
	Jadwal Kuliah Umum	https://contactmk.mkri.id/id/kuliah_umum	PASS
	Jadwal Kunjungan MKRI	https://contactmk.mkri.id/id/kunjungan/aktif	PASS
	Pengelolaan Vicon	Menampilkan tabel pengelolaan vicon	PASS
Hakim	Hakim Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan list hakim yang sedang menjabat saat ini (ketua, wakil dan anggota) - Setiap hakim memiliki informasi nama, jabatan, masa jabatan, lembaga pengusul - Terdapat tombol profil yang jika di klik akan menampilkan detail profil hakim 	PASS
	Profil Hakim	- Menampilkan profil hakim berdasarkan yang di pilih	PASS
	Hakim Periode Sebelumnya	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan list hakim yang sedang menjabat sebelumnya - Terdapat tab Ketua, Wakil, Hakim Konstitusi - Setiap hakim memiliki informasi nama, jabatan, masa jabatan, lembaga pengusul 	PASS
Perkara	Perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan 10 undang-undang yang sering diuji dan rekapitulasi utusan dalam bentuk tabel - Grafik PUU, SKLN, PHPU, dan PHPKADA - Grafik putusan kabul 	PASS
	Prosedur Permohonan	Menampilkan informasi untuk pendaftaran permohonan langsung dan pendaftaran permohonan online	PASS
	Permohonan Online	simpler.mkri.id	PASS
	Pengajuan Permohonan	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan list pengajuan permohonan berdasarkan jenis dalam bentuk tab (PUU, SKLN, PHPU, PHPKADA) - Terdapat tombol contoh permohonan dan sistematika permohonan untuk jenis masing-masing - Dapat melakukan pencarian berdasarkan jenis masing-masing - Nomor AP3 pada masing-masing item dapat di klik dan mengarah pada file tersebut - Jika memiliki Dokumen, terdapat link menuju dokumen tersebut - Terdapat pagination 	PASS

Perkara Registrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan list perkara registrasi berdasarkan jenis dalam bentuk tab (PUU, SKLN, PHPU, PHPKADA) - Dapat melakukan pencarian di masing-masing jenis - Terdapat file yang di lihat (Permohonan dan Permohonan Registrasi) - Terdapat pagination 	PASS
Jadwal Sidang	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan jadwal sidang mulai dari hari ini dan seterusnya (tanggal, perkara, pemohon, kuasa, acara dan keterangan) - Terdapat pagination sesuai dengan jumlah sidang (10 untuk 1 page) - Dapat melakukan pencarian - Dapat mencetak, download dalam bentuk CSV dan copy ke clipboard - Terdapat tombol tracking yang mengarah pada tracking.mkri.id - Terdapat pagination 	PASS
Putusan	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan putusan berdasarkan jenis (PUU, SKLN, PHPU, PHPKADA) dalam bentuk tab - Setiap item putusan terdapat Tanggal, No AP3, Pokok Perkara, Pemohon, Amar Putusan, Status, Di Unduh, Kata Kunci dan File Pendukung - Dapat melihat File Pendukung - Dapat melakukan pencarian di masing-masing jenis - Terdapat pagination 	PASS
Risalah	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan risalah berdasarkan jenis (PUU, SKLN, PHPU, PHPKADA) dalam bentuk tab - Setiap item putusan terdapat Tanggal, Nomor Perkara, Pokok Perkara, Acara Sidang, Di Unduh, File Pendukung dan File Audio - File Pendukung dan File Audio dapat di klik - Dapat melakukan pencarian di masing-masing jenis - Terdapat pagination 	PASS
Ikhtisar	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan ikhtisar berdasarkan jenis (PUU, SKLN, PHPU, PHPKADA) dalam bentuk tab - Setiap item putusan terdapat Tanggal, Nomor Perkara, Pokok Perkara, Di Unduh dan File Pendukung - File Pendukung dapat di klik - Dapat melakukan pencarian di masing-masing jenis - Terdapat pagination 	PASS
Anotasi	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap item anotasi terdapat judul yang dapat di klik - Terdapat pagination - Dapat melakukan pencarian 	PASS

	Rekapitulasi Perkara PUU	- Terdapat tabel rekapitulasi perkara PUU dengan pagination - Setiap item rekapitulasi perkara terdapat Tahun, Dalam Proses Yang Lalu, Diregistrasi, Jumlah, Amar Putusan, Jumlah Putusan, Dalam Proses Yang Ini, Keterangan	PASS
	Rekapitulasi Perkara PHPU	- Terdapat tabel rekapitulasi perkara PHPU dengan pagination - Setiap item rekapitulasi perkara terdapat Tahun, Dalam Proses Yang Lalu, Diregistrasi, Jumlah, Amar Putusan, Jumlah Putusan, Dalam Proses Yang Ini, Keterangan	PASS
	Rekapitulasi Perkara SKLN	- Terdapat tabel rekapitulasi perkara SKLN dengan pagination - Setiap item rekapitulasi perkara terdapat Tahun, Dalam Proses Yang Lalu, Diregistrasi, Jumlah, Amar Putusan, Jumlah Putusan, Dalam Proses Yang Ini, Keterangan	PASS
	Rekapitulasi Perkara PHPKADA	- Terdapat tabel rekapitulasi perkara PHPKADA dengan pagination - Setiap item rekapitulasi perkara terdapat Tahun, Dalam Proses Yang Lalu, Diregistrasi, Jumlah, Amar Putusan, Jumlah Putusan, Dalam Proses Yang Ini, Keterangan	PASS
Peraturan	Peraturan	Menampilkan statistik seluruh peraturan MK dalam bentuk pie chart	PASS
	Peraturan MK	- Menampilkan tabel peraturan MK dengan item Judul, Tentang, Di Unduh, File Pendukung dengan pagination - File Pendukung dapat di klik	PASS
	Peraturan Ketua MK	- Menampilkan tabel peraturan Ketua MK dengan item Judul, Tentang, Di Unduh, File Pendukung dengan pagination - File Pendukung dapat di klik	PASS
	Peraturan dan Keputusan Sekjen	- Menampilkan tabel peraturan dan keputusan Sekjen dengan item Judul, Tentang, Di Unduh, File Pendukung dengan pagination - File Pendukung dapat di klik	PASS
Publikasi	Publikasi	Menampilkan grafik jumlah publikasi dan download file publikasi	PASS
	Penghargaan	Menampilkan list penghargaan dengan pagination dan dapat di klik untuk melihat gambar penghargaan lebih besar	PASS
	Laporan Tahunan	Menampilkan list laporan tahunan dengan gambar, judul, di unduh, file pendukung, link video, flip book disertai pagination	PASS
	Perkara	- Menampilkan list perkara dengan tab Putusan Landmark, Buku Kompilasi Ikhtisar Putusan, Ikon HKWN disertai pagination - Masing-masing item dapat di klik	PASS
	Majalah Konstitusi	- Menampilkan list majalah konstitusi disertai pagination - File pendukung dan Flip Book dapat di klik	PASS

	Info Buku Konpress	- Menampilkan list Info Buku Konpress dengan pagination - File pendukung dapat di klik	PASS
	Naskah Komprehensif	- Menampilkan list Info Naskah Komprehensif dengan pagination - File pendukung dapat di klik	PASS
	Jurnal & Arsip	- Menampilkan list jurnal yang dapat di klik - Menampilkan list arsip dengan pagination yang dapat klik	PASS
	Iklan Layanan Masyarakat	- Menampilkan video iklan layanan masyarakat dengan pagination yang dapat di play	PASS
	Hasil Penelitian	- Menampilkan table hasil penelitian dengan judul yang dapat di klik	PASS
	Proceeding	- Menampilkan list proceeding dengan pagination - File pendukung dapat di klik	PASS
	Artikel	- Menampilkan list artikel dengan pagination - File pendukung dapat di klik	PASS
Pengaduan	Pengaduan	- Terdapat Informasi Kontak Kami dengan tautan Email, Call Center, SMS - Terdapat Layanan Pengaduan dan Informasi dengan tautan Lapor, Whistleblowing, Kirim Surat ke MK, Tanya Jawab dengan MK, Lapor ke MKMK - Lapor -> https://mk.lapor.go.id/ - Whisteblowing -> https://wbs.mkri.id/ - Hubungi via Whatsapp	PASS
	Tanya Jawab	- Terdapat form (nama, email, pertanyaan) dan code captcha - Terdapat list tanya jawab dengan filter pencarian, tanggal dan tombol reset - Terdapat pesan sukses jika form telah tersubmit	PASS
	Kirim Surat ke MK	- Terdapat form (nama, email, perihal, isi surat, upload file) dan code captcha - Terdapat pesan sukses jika form telah tersubmit	PASS
	Laporan Ke MKMK	- Terdapat form dengan nama, alamat, profesi/pekerjaan, jenis kelamin, telpon/nomor hp, email, nomor ktp, isi laporan dengan rich text editor, upload file ktp dan file laporan, juga kode captcha - Terdapat tautan menuju Peraturan MKMK dan Keputusan MKMK	PASS
Berita MKRI	Berita MKRI	- Terdapat list berita dengan tab Berita Populer, Berita Sidang, Berita Non Sidang, Berita Dua Menit - Terdapat fitur pencarian dan index tanggal dengan pagination	PASS

Berita
MKRI

	Detail Berita MKRI	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan beberapa gambar disertai caption - Terdapat tanggal, statistik dilihat, tombol cetak dan konten berita 	PASS
Peradilan	Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan konten sejarah singkat - Menampilkan tautan kode etik dan pengumuman dewan etik 	PASS
	Sejarah & Perkembangan	Menampilkan konten Sejarah & Perkembangan	PASS
	Visi Misi	Menampilkan konten Visi Misi	PASS
	Kedudukan & Kewenangan	Menampilkan konten Kedudukan & kewenangan	PASS
	Struktur Organisasi > Bagan	Struktur Organisasi > Bagan	PASS
	Struktur Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan Hakim Konstitusi dengan jabatan masing-masing - Masing-masing hakim dapat di klik dan mengarah pada halaman Detail Hakim - Menampilkan pejabat Sekjen dan Sekjen Periode Sebelumnya - Menampilkan pejabat Panitera dan Panitera Periode Sebelumnya - Masing-masing pejabat dapat di klik dan mengarah pada halaman Profil Pejabat 	PASS
	Struktur Organisasi > Profil Pejabat	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan profil Sekjen dan Sekjen Periode Sebelumnya - Menampilkan profil Panitera dan Panitera Period Sebelumnya - Menampilkan LHKPN di masing-masing pejabat 	PASS
	Tugas Pokok & Fungsi	Menampilkan konten tugas pokok dan fungsi	PASS
	Sumpah & Janji Hakim	Menampilkan konten Sumpah dan Janji Hakim	PASS
	Emblem, Hymne & Mars	Menampilkan konten Emblem, Hymne & Mars	PASS
	Lokasi	Menampilkan konten Lokasi dengan tombol yang mengarah ke Google Map	PASS
	Profil Dewan Etik	Menampilkan seluruh profil dewan etik	PASS
Peraturan Dewan Etik	Menampilkan tabel peraturan dewan etik	PASS	

	Keputusan Dewan Etik	- Menampilkan tabel keputusan dewan etik - No dan Tentang dapat di klik	PASS
	Profil MKMK	Menampilkan seluruh profil MKMK	PASS
	Peraturan MKMK	Menampilkan tabel peraturan MKMK dengan pencarian File pendukung dapat di klik	PASS
	Pelaporan MKMK	Menampilkan tabel pelaporan MKMK dengan pagination dan pencarian, serta Dokumen yang dapat di buka	PASS
	Jadwal Sidang MKMK	Menampilkan tabel jadwal sidang MKMK dengan pagination dan pencarian	PASS
	Risalah Sidang MKMK	Menampilkan tabel risalah sidang MKMK dengan pagination dan pencarian, serta Risalah Sidang dan Risalah Audio yang dapat dibuka	PASS
	Keputusan MKMK	Menampilkan tabel keputusan MKMK dengan pagination dan pencarian, dengan nomor keterangan dan putusan yang dapat dibuka	PASS
Administra si Umum	Rencana Strategis	Menampilkan tabel rencana strategis dengan pagination dan pencarian, serta file pendukung yang dapat dibuka	PASS
	Grafik Informasi Anggaran	- Menampilkan grafik informasi anggaran tahunan (pagu dan penyerapan), dan juga setiap tahunnya dari 5 tahun kebelakang	PASS
	Informasi Anggaran	- Menampilkan tabel informasi anggaran dengan pagination - Setiap kolom terdapat file yang bisa di unduh, juga menampilkan statistik di unduh	PASS
	LAKIP	- Menampilkan LAKIP dengan pencarian dan pagination - File pendukung dapat di unduh	PASS
	Laporan Keuangan	- Menampilkan tabel laporan keuangan dengan pagination - Judul dapat di klik dan laporan keuangan dapat di unduh	PASS
	Daftar Inventaris Barang	- Menampilkan tabel daftar inventaris barang dengan pencarian dan pagination	PASS
	Daftar PNBP	- Menampilkan tabel laporan penerimaan negara bukan pajak dengan pagination - Judul dapat di klik dan laporan dapat di unduh	PASS
	Pelayanan Publik	- Menampilkan tabel pelayanan publik dengan pagination - Judul dapat di klik dan laporan dapat di unduh	PASS
	PPID	- Menampilkan konten PPID - Terdapat tombol Permohonan Informasi, Pengajuan Keberatan Informasi dan Sengketa Informasi Publik yang dapat di unduh	PASS

		- Terdapat tabel Profil, Regulasi dan Laporan, yang masing-masing file nya dapat di unduh	
	Formulir Permohonan Informasi	- Terdapat form nama, alamat, no hp, email dan nomor identitas, juga upload file identitas, rincian informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan informasi, cara memperoleh informasi dan cara mendapatkan salinan informasi - Terdapat pesan sukses jika form berhasil di submit	PASS
	Formulir Pengajuan Keberatan Informasi	- Terdapat tombol untuk cek nomor permohonan informasi - Ketika di klik, informasi akan otomatis terisi pada form - User dapat mengubah data pada bagian kecuali (nama, alamat, no hp, email, nomor identitas) - Terdapat pesan sukses jika form berhasil di submit	PASS
	LHKPN	- Terdapat tabel & grafik LHKPN dari tahun ke tahun - Grafik dapat di hover untuk menampilkan value	PASS
	Statistik Pegawai	- Menampilkan statistik pegawai dalam bentuk pie chart - Setiap item dalam chart dapat di klik untuk melihat informasi lebih detail dalam bentuk grafik - Dalam statistik pegawai detail, dapat melihat grafik menurut jenis kelamin, pendidikan, usia, agama dan status nikah	PASS
	Data Pegawai	Mengarah ke website https://apps.mkri.id/datapegawai/	PASS
	Kerjasama	- Menampilkan statistik jumlah kerjasama (nota kesepahaman, tanda tangan digital, tanda tangan basah) - Menampilkan tabel kerjasama (judul, tentang, tanggal, diunduh) dengan pencarian dan pagination	PASS
	Link	- Menampilkan tautan website lembaga negara dan mahkamah konstitusi	PASS
	Siaran Pers & Newsletter	- Menampilkan tabel siaran pers dengan pagination, dan judul yang bisa di buka - Menampilkan tabel news letter dengan pagination, dan judul yang bisa di buka	PASS
	Pengumuman	- Menampilkan tabel pengumuman dengan pagination dan judul yang bisa di buka - menampilkan tabel WTP sebanyak 14 kali	PASS
	Informasi Lelang	- Menampilkan informasi lelang dengan tab Pengumuman, Pengumuman PL dan Pengumuman GU disertai pagination dan fitur pencarian	PASS
	LPSE	Mengarah ke website lpse.mkri.id	PASS
	Reformasi Birokrasi	- Menampilkan halaman reformasi birokrasi, dengan tab Laporan Pelaksanaan, Laporan Quick Wins, Laporan Survey Pelaksanaan, Road Map dan Grand Design	PASS

		- Setiap tab terdapat tabel dengan judul yang bisa di klik, pagination dan fitur pencarian	
Unit Kerja	Unit Kerja	- Menampilkan tautan unit kerja - Menampilkan aplikasi lainnya	PASS
Pengujian UUD & SKLN	Peraturan	- Menampilkan fitur searching yang akan mengarah ke tracking.mkri.id - Menampilkan peraturan terkait pengujian undang-undang (UU RI & PMK)	PASS
	Permohonan Diterima	Menampilkan tabel permohonan diterima dengan filter tahun dan pagination, dengan file dan ap3 file yang dapat di buka	PASS
	Form	Menampilkan tabel form dan akta penanganan perkara (mahkamah dan pemohon)	PASS
	Alur	Menampilkan konten alur perkara PUU	PASS
	Jadwal	Menampilkan konten jadwal sidang dengan filter tahun dan pagination, jenis: PUU	PASS
	Streaming	Menampilkan konten live streaming sidang seperti dalam halaman Video MKRI	PASS
Pilkada Serentak	Permohonan Diterima	Menampilkan fitur searching yang akan mengarah ke tracking.mkri.id Menampilkan Daftar Permohonan Perkara Pilkada dengan jenis Gubernur, Bupati dan Walikota Menampilkan tabel untuk masing-masing jenis dengan fitur pencarian, dan file-file yang bisa di unduh (AP3, Registrasi, File lainnya)	PASS
	Statistik Daftar Permohonan	Menampilkan statistik Permohonan dan Perkara untuk masing-masing jenis	PASS
	Peraturan	Menampilkan peraturan terkait pilkada serentak dengan filter tahun (UU RI, PMK, PKPU, KKPU, Peraturan Bawaslu)	PASS
	Form dan Fakta	Menampilkan tabel form dan akta penanganan perkara (mahkamah dan pemohon) dengan filter tahun	PASS
	Alur Perkara	Menampilkan konten alur perkara PUU dengan filter tahun	PASS
	Jadwal Sidang	Menampilkan konten jadwal sidang dengan filter tahun dan pagination, jenis: PHPKADA	PASS
	Streaming	Menampilkan konten live streaming sidang seperti dalam halaman Video MKRI	PASS
PHPU & Pilpres	Permohonan Diterima	Menampilkan fitur searching yang akan mengarah ke tracking.mkri.id Menampilkan Daftar Permohonan Perkara PHPU dengan jenis Perkara DPR/DPRD, Perkara DPD, Perkara Presiden/Wapres	PASS

		Menampilkan tabel untuk masing-masing jenis dengan filter pencarian dan tahun, dan file-file yang bisa di unduh (AP3, Registrasi, File lainnya)	
	Peraturan	Menampilkan peraturan terkait pilkada serentak dengan filter tahun (UU RI, PMK, PKPU, KKPU, Peraturan Bawaslu)	PASS
	Form dan Fakta	Menampilkan tabel form dan akta penanganan perkara (mahkamah, pemohon, termohon, pihak terkait dan bawaslu, serta pemilihan umum legislatif DPD) dengan filter tahun untuk masing-masing jenis	PASS
	Alur Perkara	Menampilkan konten alur perkara PUU dengan filter tahun	PASS
	Jadwal Sidang	Menampilkan konten jadwal sidang dengan filter tahun dan pagination, jenis: PHPU	PASS
	Streaming	Menampilkan konten live streaming sidang seperti dalam halaman Video MKRI	PASS
Fitur Aksesibilitas	Fitur Aksesibilitas	Fitur aksesibilitas mode suara, perbesar dan perkecil teks.	PASS
Navigasi	Navigasi Utama	Menampilkan menu navigasi utama sesuai desain	PASS
	Navigasi Level 2 dan Level 3	Menampilkan navigasi level 2 dan level 3 sesuai dengan menu utama yang dipilih	PASS

Penutupan & Garansi

Proyek ini dinyatakan selesai dan diserahkan pada tanggal 5 April 2024, sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

Garansi untuk proyek ini berlaku selama 6 bulan, dimulai dari tanggal penyelesaian proyek pada 5 April 2024, dan berakhir pada 5 Oktober 2024. Garansi mencakup penyelesaian masalah yang terkait dengan kode di front-end yang dapat mengganggu fungsionalitas atau tampilan website. Namun, garansi tidak mencakup pengembangan fitur baru yang tidak termasuk dalam lingkup pengembangan proyek sebelumnya.

Jika memiliki pertanyaan lebih lanjut atau memerlukan bantuan selama periode garansi, dapat menghubungi Luthfi Hariz sebagai Project Manager, melalui nomor handphone +6285697586581 atau email di luthfihariz@gmail.com.

Laporan Pengembangan Sistem Informasi Penanganan Perkara

1. Fitur Jadwal Sidang

Fitur Jadwal Sidang sudah disesuaikan dengan kebutuhan perkara PHPU 2024, adapun beberapa penyesuaian dan penyempurnaan sebagai berikut:

- Jenis sidang sudah disesuaikan dengan perkara PHPU
- Tanggal Ketetapan sudah otomatis tercatat jika sebelumnya sudah diinput
- Tanggal sidang menampilkan tanggal sekarang
- Penambahan fitur tempat sidang atau ruang sidang dengan menu dropdown agar pencatatan informasi terkait ruang sidang seragam.
- Edit jadwal sidang sudah disesuaikan dengan penambahan-penambahan dan penyesuaian fitur diatas
- Adanya fitur pending untuk penjadwalan sidang
- Adanya fitur keterangan ketika jadwal sidang berubah dan notif WA ke petugas persidangan

The screenshot shows the 'Jadwal Sidang' (Court Schedule) input form. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Search', and 'Logout' options. Below the navigation bar, the page title is 'Persidangan' with a sub-menu 'Jadwal Sidang'. The main content area is titled 'Jadwal Sidang' and contains a table with the following data:

Nomor Perkara	Tanggal Registrasi	Pokok Perkara	Panitera Pengganti	Panel Hakim
01-01-01-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023	20-09-2023	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024	Alboin Pasaribu	1. Anwar Usman 2. Enny Nurbaningsih 3. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

Below the table, there is a dropdown menu for 'Jenis Sidang' set to 'Pendahuluan'. Underneath, there is a section titled 'Sidang Pendahuluan (Panel)' with a form for scheduling parameters:

- Acara Sidang: [Text input field]
- Tanggal Ketetapan Hari Sidang: 2023-10-05
- Tanggal Sidang: 2023-10-05
- Jam Mulai: 00 : 00
- Jam Selesai: 00 : 00
- Tempat: Gd. MKRI 1 Lantai 2

A 'Tambah' (Add) button is located at the bottom left of the form.

Gambar 1 input jadwal sidang

The screenshot shows the 'List Jadwal Sidang per Perkara' (Court Schedule List per Case). The table is organized into three sections based on the type of court session:

Sidang Pendahuluan (Panel)

Acara Sidang	Tanggal Ketetapan Hari Sidang	Tanggal Sidang	Waktu Sidang	Waktu Selesai Sidang	Ubah	Hapus
Pemeriksaan Pendahuluan (I)	20-09-2023	22-09-2023	10:00	Selesai	Ubah	Hapus

Sidang Pemeriksaan Perkara

Acara Sidang	Tanggal Ketetapan Hari Sidang	Tanggal Sidang	Waktu Sidang	Waktu Selesai Sidang	Ubah	Hapus
Pemeriksaan Perkara (II)	20-09-2023	04-10-2023	10:00	Selesai	Ubah	Hapus

Sidang Pengucapan Putusan (Pleno)

Acara Sidang	Tanggal Ketetapan Hari Sidang	Tanggal Sidang	Waktu Sidang	Waktu Selesai Sidang	Ubah	Hapus
Pembacaan Putusan (III)	20-09-2023	10-10-2023	09:00	Selesai	Ubah	Hapus

Gambar 2 list jadwal sidang per perkara

Persidangan Layout Sidang

Layout Sidang - x

PANEL: ALL +

No	Tanggal	No Perkara	Judul Perkara	Pemohon	Kuasa Pemohon	Acara Sidang	Panel	Layout Sidang
1	22 September 2023, 10:00 WIB	01-01-01-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024	• Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	• rudi kurniawan	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	1	Lihat Layout Sidang
2	22 September 2023, 12:00 WIB	01-02-19-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) Dapil DKI Jakarta II Tahun 2024	• YURI KEMAL FADLULLAH, SH, MH		Pemeriksaan Pendahuluan (I)	1	Setting Layout Sidang
3	04 Oktober 2023, 10:00 WIB	01-01-01-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024	• Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	• rudi kurniawan	Pemeriksaan Perkara (II)	1	Lihat Layout Sidang
4	10 Oktober 2023, 09:00 WIB	01-01-01-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024	• Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	• rudi kurniawan	Pembacaan Putusan (III)	PLENO	Setting Layout Sidang

Gambar 4 List jadwal sidang untuk Layout dipersidangan

Layout Sidang - x

Nomor Perkara	Acara Sidang	Tanggal Ketetapan Hari Sidang	Tanggal Sidang	Waktu Sidang
01-01-01-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	20-09-2023	22-09-2023	10:00

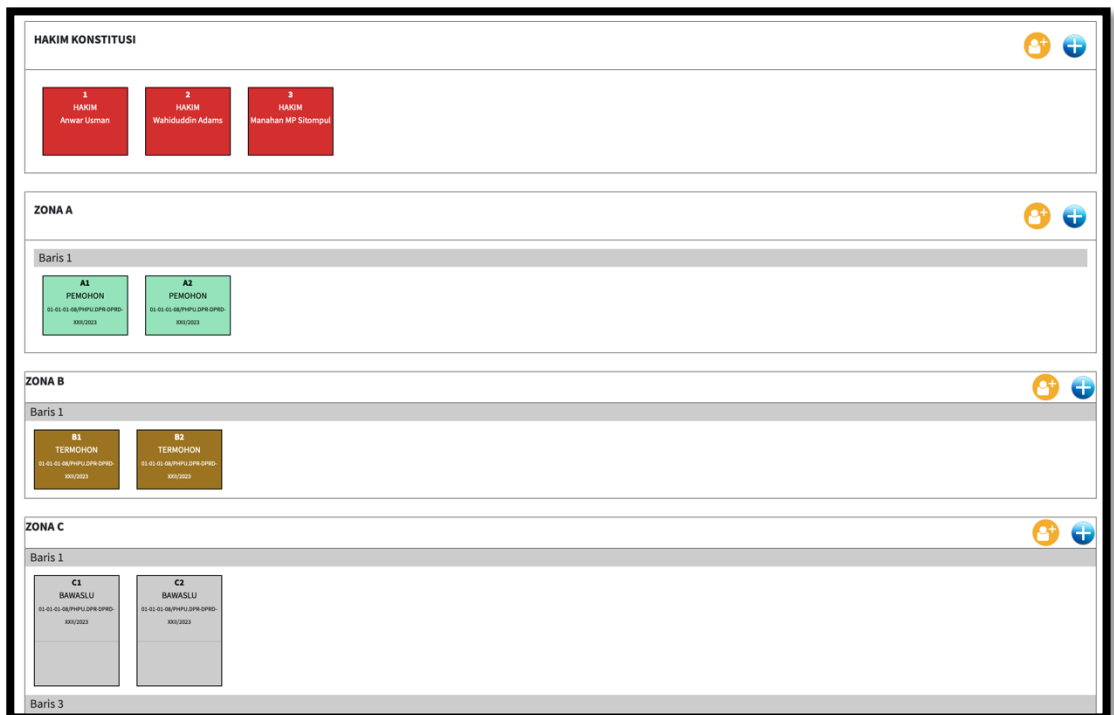
Setting Layout Ruang Sidang (Kuota Kursi Para Pihak)

Ruang Sidang: Pilih

Layout Sidang 1. CETAK LAYOUT 2. CETAK DAFTAR HADIR 3. CETAK DAFTAR BANGKU

The diagram illustrates the courtroom layout. At the top center is the 'PETUGAS PERSIDANGAN' (Court Officer). Below it are the 'CALON PIHAK TERKAIT' (Related Parties). The layout is divided into three main blocks: 'BLOK B' on the left, 'BLOK C' in the center, and 'BLOK A' on the right. Each block contains 'PEMOHON' (Petitioner) and 'TERMOHON' (Respondent) positions. At the bottom center is the 'MAJELIS HAKIM' (Panel of Judges), represented by three red circles.

Gambar 5 layout ruang sidang

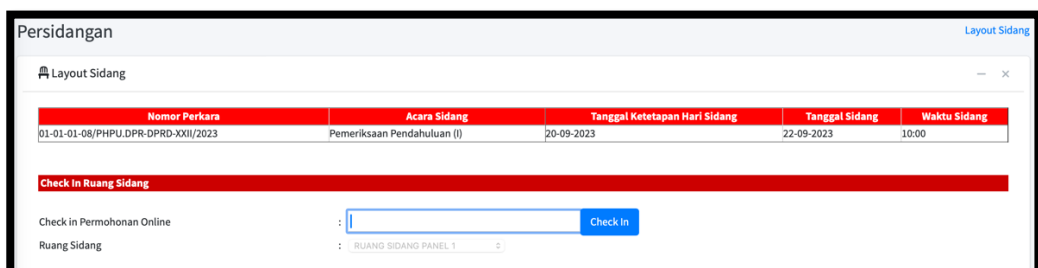


Gambar 6 Ploting kuota bangku sidang

3. Fitur Layout Sidang Gugus Tugas Kejurupanggilan

Layout Sidang Gugus Tugas Kejurupanggilan sudah disesuaikan dengan kebutuhan perkara PPHU 2024, adapun beberapa penyesuaian dan penyempurnaan sebagai berikut:

- List Jadwal Sidang pada fitur Layout sidang sudah disesuaikan dan dikelompokkan dengan panel dan jadwal yang sama, sehingga memungkinkan dalam satu ruang sidang terdapat beberapa perkara dan ada status apakah layout sidang sudah diploting atau belum.
- Untuk gambar layout sudah disesuaikan dengan kebutuhan perkara PPHU 2024
- Adanya fitur untuk tambah bangku dan pengurangan bangku, jadi aplikasi memungkinkan untuk mengikuti perubahan layout sidang sesuai dengan yang ada di ruang sidang sebenarnya
- Penambahan fitur checkin Para Pihak untuk masuk ke ruang sidang dengan scan barcode
- Adanya fitur untuk menyesuaikan para pihak yang hadir
- Adanya fitur mencetak daftar para pihak



Gambar 7 Checkin Kehadiran Sidang

No	Tanggal	No Perkara	Judul Perkara	Pemohon	Kuasa Pemohon	Acara Sidang	Panel	Layout Sidang
1	22 September 2023, 10:00 WIB	01-01-01-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024	• Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	• rudi kurniawan	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	1	Lihat Layout Sidang
2	22 September 2023, 12:00 WIB	01-02-19-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) Dapil DKI Jakarta II Tahun 2024	• YURI KEMAL FADLULLAH, SH, MH		Pemeriksaan Pendahuluan (I)	1	Layout Sidang Belum Disetting
3	04 Oktober 2023, 10:00 WIB	01-01-01-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024	• Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	• rudi kurniawan	Pemeriksaan Perkara (II)	1	Lihat Layout Sidang
4	10 Oktober 2023, 09:00 WIB	01-01-01-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024	• Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	• rudi kurniawan	Pembacaan Putusan (III)	PLENO	Layout Sidang Belum Disetting

Gambar 8 List jadwal sidang kejurupanggilan

Jenis : TERMOHON
 Nama : Joko Sampurna
 No. HP : 80808121212
 Sebagai : Kuasa Termohon
 Nomor Perkara : 01-01-01-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023
 Nomor APPP : 01-01-01-08/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/09/2023

Tombol ini hanya untuk check in

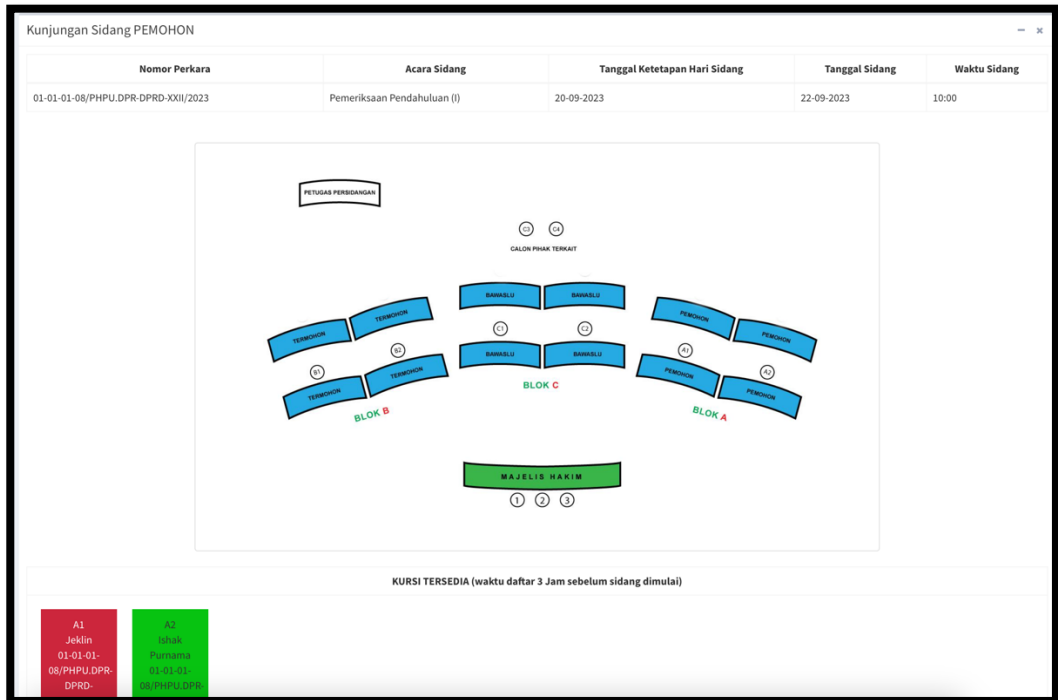
Gambar 9 Edit kehadiran para pihak

4. Fitur Konfirmasi Kehadiran Para Pihak

Fitur Konfirmasi Kehadiran Para Pihak adalah fitur baru untuk memudahkan para pihak untuk melakukan konfirmasi kehadiran sidang yang sudah terintegrasi dengan fitur panggilan persidangan dan checklist persidangan dan kejurupanggilan, adapun manfaat fitur ini adalah:

- a. Terintegrasinya konfirmasi kehadiran dengan panggilan persidangan dengan mengirimkan link untuk melakukan konfirmasi siapa saja yang akan hadir dalam ruang sidang. Fitur ini juga sudah terintegrasi dengan plotting layout sidang, sehingga para pihak hanya bisa mengisi bangku yang telah di berikan oleh bagian persidangan

- b. Terintegrasinya konfirmasi kehadiran dengan aplikasi checklist persidangan yang mana checklist persidangan akan terkoneksi dengan data konfirmasi kehadiran.
- c. Terintegrasinya konfirmasi kehadiran kedalam fitur kejurupanggilan, sehingga kejurupanggilan bisa mengetahui siapa saja yang sudah konfirmasi untuk hadir didalam persidangan nantinya, dan sudah terintegrasi dengan fitur checkin pada saat para pihak hadir kedalam ruang sidang
- d. Para pihak setelah melakukan konfirmasi kehadiran maka akan menerima WA yang berisi informasi sidang, bangku sidang, QRCode untuk kehadiran



Gambar 10 Konfirmasi kehadiran

sidang.mkri.id/index.php?page=phpu.SetKuota2&idrsid=26568

Jenis : PEMOHON

Nama : Ishak Purnama

KTP : 3191281921212

No. HP : 081210471812

Sebagai : Kuasa Pemohon

Nomor Perkara : 01-01-01-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2023

Nomor APPP : 01-01-01-08/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/09/2023

Simpan


Gambar 11 Form Konfirmasi Kehadiran Sesuai dengan kuota bangku sidang

sidang.mkri.id/index.php?page=phpu.CetakKar

NOMOR A1 PEMOHON


Data Pengunjung
 Nama : Jeklin
 KTP : 127107670704001
 No. HP : 085658566768
 Sebagai : Pemohon
 Tanggal Daftar :

Info Sidang
 Waktu Sidang : 2023-09-22, 10:00 WIB
 No Perkar : 01-01-01-08/PHPU.DPR-
 DPRD-XXII/2023
 Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
 Lokasi : Ruang Sidang PANEL 1



[Cetak](#) [Kirim WA](#)

MKRI



INFORMASI BANGKU SIDANG

**NOMOR A2
PEMOHON**

Data Pengunjung
 Nama : Ishak Purnama
 KTP : [3191281921212](#)
 HP : [081210471812](#)
 Sebagai : Kuasa Pemohon
 Tanggal Daftar :

Info Sidang
 Waktu Sidang : 2023-09-22, 10:00
 WIB
 No Perkar : 01-01-01-08/PHPU.DPR-
 DPRD-XXII/2023
 Acara Sidang : Pemeriksaan
 Pendahuluan (I)
 Lokasi : PEMOHON.


Notifikasi oleh sistem Aplikasi
SIMPP 16.44

Gambar 12 Cetak Konfirmasi Kehadiran dan WA Qrcode bangku sidang untuk kehadiran

5. Fitur Amicus Curiae


Fitur Amicus Curiae pada website MK, mengupload Amicus Curiae agar masyarakat dapat mengakses

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**



**LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI**

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA



BERANDA > AMICUS CURIAE

AMICUS CURIAE Cari

No.	Tanggal Surat	Dari	Isi Ringkasan	File Pendukung
1	2024-04-22	Team Hukum Merah Putih & Rumah Juang Relawan Jokowi	Menolak Peradilan dengan Model Amicus Curiae	File Amicus Curiae
2	2024-04-22	DPP KAI Erman Umar	Amicus Curiae – Masukan Kepada YM Majelis Hakim Konstitusi atas Sengketa Pilpres	File Amicus Curiae
3	2024-04-20	Andri Prasetya	Pengajuan Amicus Curiae Perkara PHPU Presiden 2024	File Amicus Curiae
4	2024-04-19	Bambang Prasanto	Amicus Curiae – Bambang Prasanto	File Amicus Curiae
			Permohonan Konfederasi Pejuang Bela Negara (KPNB)	



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 2352 9000, Faksimili (62-21) 3520177, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

DAFTAR KEHADIRAN SIDANG PARA PIHAK (PANEL 1)

Tanggal Sidang : 10 Juni 2024 08:30 WIB

Acara Sidang : Pengucapan Putusan/Ketetapan

NO.	JENIS	NO. PERKARA	NAMA	SEBAGAI
HAKIM KONSTITUSI				
1	HAKIM	-	ANWAR USMAN	
2	HAKIM	-	GUNTUR HAMZAH	
3	HAKIM	-	DANIEL YUSMIC PANCSTAKI FOEKH	
4	HAKIM	-	ARIEF HIDAYAT	
5	HAKIM	-	SUHARTOYO	
6	HAKIM	-	SALDI ISRA	
7	HAKIM	-	ENNY NURBANINGSIH	
8	HAKIM	-	RIDWAN MANSYUR	
9	HAKIM	-	ARSUL SANI	
ZONA A				
A1	PEMOHON	191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	PUTU BRAVO TIMOTHY, S.H., M.H.	KUASA (ISLAM)
A2	PEMOHON	191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024		
A3	PEMOHON	196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	HARIMUDDIN S.H.	KUASA (ISLAM)
A4	PEMOHON	196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	MUHAMAD RAZIV BAROKAH, S.H., M.H.	KUASA (ISLAM)
A5	PEMOHON	177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI	KUASA (ISLAM)
A6	PEMOHON	177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	AHMAD KAILANI	KUASA
A21	PEMOHON	185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI	KUASA
A22	PEMOHON	185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	AHMAD KAILANI	KUASA (ISLAM)
A23	PEMOHON	158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI	KUASA
A24	PEMOHON	158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	AHMAD KAILANI	KUASA (ISLAM)